

ARTIKEL

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN TEMBALANG

Christ, Margaretha, Fathurrohman
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang

ABSTRAKSI

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui; sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih berupa sumur sedalam 100m, pelaksanaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program.

Dalam mengevaluasi program PAMSIMAS, peneliti menggunakan desain metode campuran sejajar/bersamaan, dimana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dalam waktu yang sama untuk saling melengkapi. Melalui penerapan Teknik *Two Stage Cluster Sampling*, ditemukan sampel empat kelurahan di Kecamatan Tembalang dengan jumlah partisipan 108 KK. Keempat Kelurahan tersebut belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM, dan hanya mengandalkan air sungai serta sumur dangkal sebagai sumber air bersih sehingga pada musim kemarau warga mengalami kekurangan air karena sumber air mulai mengering selain itu air sumur dangkal juga tidak layak konsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh program PAMSIMAS bagi masyarakat dengan analisis data menggunakan kategorisasi dan proses prioritas (modus) dalam tabel distribusi frekuensi kualitatif tanpa menghilangkan hasil wawancara yang penting. Diketahui bahwa setelah penerapan PAMSIMAS, masyarakat mendapatkan dampak seperti; kemudahan dalam mengakses air dengan harga Rp 1000/m³, terpenuhinya kebutuhan air bersih dimana debit air tidak dipengaruhi oleh cuaca, stop BAB sembarangan sebagai bentuk pelaksanaan PHBS, serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun.

Melalui evaluasi yang dilakukan pada masing-masing fenomena dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Tembalang.

Kata Kunci : Evaluasi, Dampak, PAMSIMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disamping kesadaran masyarakat akan hidup sehat masih diragukan, sarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat pun dirasa masih sangat terbatas. Era Otonomi Daerah saat ini menuntut pemerintah daerah memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor pembangunan. Salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar mampu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Seperti yang dikatakan oleh L Blum dalam buku pegangan Promosi Kesehatan Masyarakat dalam Program PAMSIMAS bahwa:

“Derajat kesehatan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan medis, dan keturunan. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah keadaan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan, baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dibidang kesehatan, ekonomi maupun teknologi. (dalam Buku Pegangan PAMSIMAS, 2010:2)

Dalam upaya meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johannesburg Summit tahun 2002. Salah satu kesepakatan dalam MDGs (target 9) adalah menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Untuk itu sebagai upaya pencapaian target diatas, pemerintah berusaha memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka diberlakukanlah program PAMSIMAS yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semenjak diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri No. 900/1307/IV/Bangda tanggal 11 September 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Kebutuhan Dana Pendamping Program PAMSIMAS; dengan ini Pemerintah Daerah menegaskan kembali komitmen atas partisipasinya dalam Program PAMSIMAS dan akan menyediakan dana pendukung APBD untuk Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUB), biaya operasional proyek (BOP) untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi program PAMSIMAS.

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

PDAM sebagai Perusahaan Daerah Air Minum yang memberikan jasa pelayanan untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak konsumsi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat cenderung lebih memilih mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). Hal ini kemudian menjadi masalah bagi masyarakat miskin, dimana mereka sulit memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas karena dipengaruhi keadaan ekonomi.

PAMSIMAS yang sudah berjalan dari tahun 2008 sampai saat ini dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dan partisipatif, artinya seluruh proses perencanaan PAMSIMAS seperti pemilihan kebutuhan air dan

pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai bentuk pengejawantahan atas perubahan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, oleh karena itu diharapkan sarana yang terbangun terpelihara dan dikelola oleh masyarakat termasuk pula proses pengawasan dan pemanfaatannya sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh sarana air bersih dan sanitasi namun juga mendapatkan dampak dari program PAMSIMAS.

Sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang dihasilkan harus dapat memberikan layanan kebutuhan air minum dan sanitasi secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (dari sudut pandang pengguna/masyarakat maupun pemerintah), mencukupi kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi agar tetap berfungsi. Semakin besar kontribusi masyarakat maka semakin tinggi komitmen masyarakat warga untuk memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Oleh karenanya Penyediaan sarana Air Minum dan Sanitasi Umum Berbasis Masyarakat yang sudah berjalan empat tahun ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan serta membawa dampak yang baik bagi masyarakat.

Pada kenyataannya, dalam Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah KK yang memiliki akses air bersih sebanyak 82.448 KK (71,52%) dari 115.286 KK yang diperiksa, sedangkan dari KK yang diperiksa yang layak sehat sekitar 61.595 KK (53,43%). Hal ini

menunjukkan target akses keluarga dalam memperoleh air bersih yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 yakni sebesar 85% belum tercapai. Selain itu keberadaan jamban keluarga sebagai salah satu sarana untuk mengurangi penularan penyakit masih belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan laporan PUSKESMAS, pada tahun 2010 diketahui bahwa 84.325 KK telah memanfaatkan jamban keluarga dan 64.176 KK yang telah memenuhi syarat jamban yang sehat dari 115.286 KK yang telah dilakukan pemeriksaan.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi Kota Semarang untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai maka teretuslah program WSLIC-3 yang kemudian dikenal sebagai PAMSIMAS (Peyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang merupakan salah satu program PNPM Mandiri Pendukung dan merupakan program pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dari Bank dunia dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi (menurunkan angka Buang Air Besar Sembarangan dan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di Sekolah Dasar). Program PAMSIMAS melibatkan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat peserta program berperan sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu pelayanan air bersih dan sanitasi ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu Pendekatan Berbasis

Lembaga melalui Dinas, Badan, Perusahaan daerah, Perusahaan Swasta, dan Pendekatan Berbasis Masyarakat.

Program PAMSIMAS yang sudah berjalan dari tahun 2008 sampai saat ini menerima sumber dana dari Bank Dunia melalui Pemerintah Pusat sebesar Rp 207,9 milyar, Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 29,7 milyar dan Dana Masyarakat sebesar Rp 59,4 milyar, dengan total berjumlah 297 milyar. Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS masing-masing desa/kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 275 juta yang berasal dari Pemerintah (70%), pemerintah kabupaten kota (10%) dan masyarakat sebesar (20%). Adapun hasil program PAMSIMAS antara lain terbangunnya sarana air bersih/air minum berupa sumber air, bak penampung, bak pembagi, dan jaringan perpipaan hingga sambungan ke rumah-rumah, dan juga terwujudnya peningkatan sanitasi pada 1.164 unit Sekolah Dasar.

Kota Semarang sebagai bagian dari lokasi proyek kegiatan PAMSIMAS dari 30 lokasi kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dimana pada tahun 2008 terdapat 9 lokasi program, tahun 2009 terdapat 17 lokasi, tahun 2010 terdapat 14 lokasi, dan tahun berjalan sebanyak 15 lokasi. Adapun lokasi-lokasi tersebut dipilih pertahun dengan melibatkan kordinasi sektoral ditingkat kabupaten/kota, penyusunan daftar panjang/longlist, sosialisasi PAMSIMAS ditingkat kabupaten/kota, sosialisasi PAMSIMAS ditingkat desa/kelurahan musyawarah/rembug warga, dan verifikasi minat dan kesiapan masyarakat.

Dari 16 Kecamatan yang ada di kota Semarang, Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang menerima program PAMSIMAS dengan kriteria kelurahan:

- (1) Adanya kontribusi masyarakat berupa:
 - (1.1) Natura (materi lokal, tenaga kerja, dan lain-lain) sebesar 16%
 - (1.2) Dana Tunai sebesar 4% dari total biaya
- (2) Kesanggupan masyarakat untuk:
 - (2.1) Membiayai operasional dan pemeliharaan
 - (2.2) Membayar/mengumpulkan iuran
- (3) Indeks kemiskinan yang tinggi di kelurahan
- (4) Kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum (air bersih)
- (5) Kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi
- (6) Kelurahan dengan preverensi penyakit terkait air (diare) tinggi
- (7) Kelurahan yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum dan sanitasi)

Adapun kelurahan yang menjadi lokasi penerima Program PAMSIMAS di ke Kecamatan Tembalang tahun 2008 adalah Kelurahan Rowosari, tahun 2009 diterima oleh Kelurahan Tembalang, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Mangunharjo, dan tahun 2010 diterima oleh Kelurahan Jangli.

Kecamatan Tembalang termasuk kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin tahun 2010 sebesar 11.266 KK, menempati peringkat ketiga Kecamatan miskin di Kota Semarang setelah Kecamatan Semarang

Barat dan Semarang Utara. Klasifikasi Kelompok miskin di sektor pendidikan sebanyak 8.191 KK, disektor Pangan 9.660 KK, perumahan sebanyak 6.373 KK, Sandang sebanyak 9.323 KK, sektor kesehatan sebanyak 8.020 KK, dan sektor lainnya sebanyak 3.687 KK. Dengan adanya program PAMSIMAS di Kecamatan Tembalang diharapkan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan keberlangsungannya.

Kenyataan di lapangan sebelum diberikannya Program PAMSIMAS, Kelurahan Tembalang merupakan kelurahan dengan daerah yang bertopografi curam dan tidak merata, hal ini mengakibatkan distribusi air bersih dari PDAM belum menjangkau seluruh daerah. Penduduk biasanya menggunakan air bersih melalui pembangunan sumur bor atau sumur galian. Di Kelurahan ini produktifitas air cukup tinggi namun telah ditemukan tanda-tanda pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga karena sumur yang digunakan adalah sumur dangkal. Berbeda pula dengan kondisi yang dialami oleh Kelurahan Bulusan, dimana RW 1, RW 2, RW 3 membutuhkan air bersih, karena PDAM belum masuk kewilayah tersebut. Sumur dangkal menjadi satu-satunya sumber air bagi warga, dan bila memasuki musim kemarau panjang mereka kesulitan mendapatkan air bersih.

Krisis air bersih di Kelurahan Mangunharjo hampir sama dengan kondisi yang dialami Kecamatan Bulusan. Pada musim kemarau sumur artesis yang diandalkan warga untuk memenuhi kebutuhan warga mulai

mengering. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, masyarakat mengandalkan aliran sungai yang letaknya 2 km hingga 3 km dari pemukiman.

Masyarakat miskin di Kelurahan Rowosari menggunakan sumur gali dan sungai sebagai sarana air bersih. Pada saat musim penghujan dan musim kemarau di Kelurahan Rowosari penggunaan air bersih cukup untuk minum, mandi, cuci peralatan masak, kecuali diwilayah RW 1 dimana air bersih hanya cukup untuk minum dan masak saja, untuk kebutuhan yang lain warga harus beraktifitas di sungai. Secara umum, jamban yang ada di Kelurahan Rowosari berfungsi dengan baik, Jamban digunakan untuk BAB dengan kloset atau dudukan yang terpasang dengan baik. Bangunan jamban yang dibangun juga dapat memberikan privasi pada pengguna sarana sanitasi pribadi dengan swadaya murni dari masyarakat.

Program PAMSIMAS yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan diwujudkan dengan pembangunan sistem pelayanan sumber air tanah dalam/sumur dalam (bor), sistem pelayanan sumber air tanah dalam/menara air, dan sistem pelayanan sumber air tanah dalam bentuk perpipaan, serta sarana cuci tangan di Sekolah Dasar, yang disesuaikan dengan kondisi topografi kelurahan yang dipilih.

Masyarakat bersama Badan Pengelola Sarana bersama-sama menjaga keberlangsungan sarana air bersih yang telah dibangun dan memiliki iuran pemanfaatan yakni iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota pemakai/pemanfaat sarana air minum dan sanitasi atas penggunaan air dan

sarana sanitasi. Besar iuran ditentukan secara musyawarah oleh warga atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan aspek operasional, pemeliharaan dan penyusutan. Untuk per meter kubiknya rata-rata masyarakat dipungut sebesar Rp 1000 dan berusaha mengembangkan sarannya yang telah ada sehingga debit air yang dihasilkan sumur bor atau menara air mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

Setelah adanya program PAMSIMAS, pada awalnya masyarakat merasa sangat terbantu karena memperoleh sarana air bersih yang lebih murah, akan tetapi tidak semua masyarakat dari kelurahan Bulusan, Rowosari, Mangunharjo, dan Kelurahan Tembalang yang diberikan bantuan PAMSIMAS terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Seperti masalah yang ada di Kelurahan Tembalang RW 7, dimana sarana air bersih yang baru dibangun kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah mengalami pergantian mesin yang disebabkan oleh endapan lumpur yang terlalu tinggi sehingga kapasitas/volume air yang keluar semakin kecil.

Permasalahan lainnya adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air kerumah-rumah didaerah yang struktur tanahnya lebih tinggi sama diameternya dengan saluran pipa yang ada didaerah lebih rendah. Hal ini mengakibatkan warga yang tinggal didaerah yang lebih tinggi tidak kebagian air. Seharusnya pada saat pembangunan panjang pipa saluran air ke daerah yang topografinya tinggi, lebih besar dibandingkan daerah dibawahnya. Selain itu di Kelurahan Mangunharjo dan Rowosari beberapa warga masih memilih mencuci pakaian di sungai. Kelurahan Bulusan

mengalami kendala dalam pembagian air karena tidak proporsional antara air yang mengalir dengan jumlah warga yang mengkonsumsi.

Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan secara efektif adalah sarana yang dapat berfungsi terus menerus, sehingga pengguna mendapat kepuasan yang tinggi dan bersedia untuk menggunakan dan memelihara sarana, serta sebagian besar masyarakat mempunyai akses. Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang digunakan secara efektif adalah sarana yang oleh sebagian besar masyarakat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan melestarikan lingkungan. Namun pada kenyataannya, untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan merubah pola hidup sehat masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS yang melibatkan masyarakat secara aktif belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pendekatan PAMSIMAS, seperti mewujudkan partisipasi dengan kesetaraan gender dimana wanita diikutsertakan dengan kuota 40% masih sangat sulit direalisasikan oleh pengelola PAMSIMAS. Setelah adanya program PAMSIMAS di beberapa kelurahan ditemukan adanya peningkatan persaingan dalam hal penggunaan sumber air, dimana daerah serupa disatu kelurahan atau disatu kecamatan menginginkan adanya sambungan pipa air bersih ke sarana sumur bor yang dibangun, sementara dalam perencanaan program hal ini tidak memungkinkan dilakukan karena akan mengurangi debit air yang disalurkan ke rumah tangga yang sudah disepakati sebelumnya.

Bahkan saat ini banyaknya pengguna air tidak sesuai dengan air yang diproduksi, sehingga terkadang ada konflik diantara masyarakat dengan BPS.

Permasalahan-permasalahan dalam program PAMSIMAS diatas dilatarbelakangi oleh beberapa hal baik itu yang berasal dari masyarakat maupun dari lembaga pelaksana/pengelola. *Pertama*, keterbatasan waktu yakni masa pelaksanaan pembangunan dimana program menuntut masyarakat yang mendapat bantuan bisa secara mandiri mengelola sarana yang disediakan, dan sosialisasi program di setiap kecamatan yang hanya berjalan 1 tahun tidak cukup untuk mengubah perilaku hidup sehat masyarakat, karena hal ini sangat terkait dengan merubah *mainset* atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. *Kedua*, prinsip kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhinya adalah terbatas merupakan salah satu latar belakang terjadinya permasalahan-permasalahan diatas. Tidak bisa dipungkiri populasi yang semakin banyak menuntut pelayanan sarana yang semakin besar pula. *Ketiga*, kurang koordinasi antara BPS dengan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, sehingga sulit mencari solusi yang tepat dan diterima seluruh masyarakat. *Keempat*, sebelum pelaksanaan program pihak pelaksana kurang melakukan pengamatan mengenai topografi daerah yang diberikan bantuan, sehingga konsep pembagian air secara adil tidak dirasakan sama oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya program PAMSIMAS yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan dampak keberlanjutan pelayanan masih perlu diteliti lebih lanjut, yakni apakah setelah

masyarakat memperoleh pelayanan dari PAMSIMAS permasalahan kekurangan air bersih tidak dialami lagi oleh masyarakat setempat dan program yang diberikan kepada daerah tertentu apakah tepat sasaran. Selain itu pengelolaan PAMSIMAS yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat dan badan pengelola setempat (steakholder) seharusnya benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat dan adanya transparansi serta akuntabilitas baik dalam pengelolaan sarana-prasarana yang ada ataupun dalam mengelola dana masyarakat.

Melihat latar belakang permasalahan diatas maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “**Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Tembalang**” yang berguna untuk mengetahui sejauh mana hasil program PAMSIMAS tahun 2010 membawa dampak bagi masyarakat Kecamatan Tembalang yang mendapatkan program.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam bukunya, Prof Dr Sugiyono mengatakan masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara teori dan praktik, penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun

berdasarkan masalah yang harus dicari jawaban melalui pengumpulan data.

Dalam menganalisis sebuah kebijakan, ada tahap-tahap yang harus dilalui sesuai dengan fokus yang diinginkan penulis. Adapun penelitian mengenai Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Tembalang ini ingin mengkaji dan mengetahui “Apa dampak yang ditimbulkan oleh program PAMSIMAS bagi masyarakat?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- (1) Untuk mengetahui dampak program PAMSIMAS
- (2) Untuk mengetahui pemeliharaan dan pengelolaan sarana PAMSIMAS setelah pembangunan sarana

1.4. Kegunaan Penelitian

- (1) Kegunaan Teoritis

Mengembangkan ilmu administrasi publik terutama pada aspek evaluasi dari problematika yang ada serta sebagai sumbangan peneliti bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

(2) Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi gambaran mengenai program PAMSIMAS di kota Semarang sehingga dapat diketahui pengaruh dari program dengan:

- (2.1) Memberi masukan dalam penyempurnaan kebijakan kesehatan khususnya program PAMSIMAS
- (2.2) Ditemukannya pengaruh dan dampak dari pelaksanaan program PAMSIMAS maka akan berguna menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat
- (2.3) Mengungkapkan kenyataan yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Tembalang yang belum seluruhnya memperoleh air bersih yang memadai sehingga dapat menggerakkan pengetahuan dan perspektif pembaca.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Setiap penelitian menggunakan Teori. Kerlinger (1978) mengemukakan bahwa Teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi spesifikasi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (dalam Sugiyono,2010 : 41).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Teori adalah seperangkat konsep, defenisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Adapun landasan teori pokok yang digunakan sebagai sumber untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah proses menganalisis sebuah kebijakan publik, dimana tahapan yang digunakan penulis sampai dengan tahap evaluasi program. Oleh karena itu, landasan teori merupakan pemikiran lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun landasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. *Evaluasi*

Dalam Buku Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi Karangan Dr. Wirawan, Evaluasi diartikan sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Melalui pengertian-pengertian diatas, maka ditemukan beberapa komponen dalam evaluasi diantaranya:

- (a) Objek Evaluasi. Objek evaluasi adalah apa yang akan dievaluasi – Steward I. Donaldson dan Mark W. Lipsey (2006) dan Michael M. Provus (1972) menggunakan *evaluated* dan *evaluee* jika objeknya orang, adalah apa yang diteliti dalam evaluasi. Karena evaluasi dilakukan disemua sektor kehidupan, setiap sektor mempunyai objek evaluasi yang unik.
- (b) Informasi. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan atau dinilai dengan indikator objek evaluasi.
- (c) Menilai. Evaluasi melakukan penilaian kualitas (*merit*) yakni baik buruknya atau tinggi rendahnya kualitas atau kinerja program yang dievaluasi, dan penilaian manfaat (*Worth*) yakni tinggi rendahnya manfaat program dalam kaitannya dengan suatu tujuan atau standar tertentu.
- (d) Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Informasi mengenai objek evaluasi dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Bila program tidak memenuhi tolok ukur keberhasilannya, maka perlu dilakukan perubahan atau pengembangan. Sebaliknya, jika hasil evaluasi menyatakan program berhasil program tersebut akan diteruskan atau dilaksanakan didaerah lain.

Sebagaimana Menurut Peter H. Rossi & Howard E. Freeman (dalam Wirawan, 2011:15-16) evaluasi diartikan, “*Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assesing the*

conseptualization and design, implementation, and utility of social interventiaon programs.” Menurut kedua pakar evaluasi tersebut evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konseptualisasi, dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Buku dan halaman yang sama, Vendung (dalam Wirawan, 2011:16) menyatakan “*Evaluastion is limited to goverment intervention only, that is, politically or administratively planned social change, like public policies, public programs, and public services.*” Menurut Vendung, evaluasi berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik, dan layanan publik. Vendung juga mengatakan bahwa intervensi publik dewasa ini meliputi program-program substantif dan yang berorientasi dengan proses. Program-program substansif meliputi berbagai domain fungsional. Intervensi pemerintah berorientasi pada proses yaitu reformasi administrasi berkaitan dengan ide-ide dan langkah-langkah yang diarahkan pada organisasi dan fungsi administrasi publik. Evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sebagai pejabat publik dalam pekerjaannya dimasa akan datang dapat bertindak serta bertanggungjawab, kreatif, dan seefesien mungkin.

Dalam evaluasi, evaluator berusaha menggambarkan apa yang telah terjadi dan dipihak lain ia menjelaskan mengapa itu terjadi. Dalam melakukan

ini, evaluator mengamati apa yang berlangsung sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan. Untuk mempermudah evaluator dalam melakukan penilaian atas sebuah objek evaluasi maka dilakukanlah seleksi indikator-indikator yang akan dipakai untuk menilai hasil-hasil kebijakan ataupun program. Menurut IEES (dalam Hadi dan Mutrofin, 2006:84-85), pemilihan indikator merupakan tahapan penting dalam melaksanakan evaluasi, karena merupakan basis evaluator menentukan bagaimana kriteria evaluasi akan didefinisikan secara operasional.

Terkait dengan pemilihan indikator, Finsterbusch & Motz (1980) mengatakan, sekali hierarki dan dimensi waktu tujuan program telah diidentifikasi, maka kita harus memilih indikator-indikator untuk beberapa tujuan spesifik. Indikator tersebut harus dipilih secara cermat karena merupakan calon untuk dijadikan kriteria riset evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan program evaluator harus berdasarkan validitas, reliabilitas, dan utilitas indikator.

Suatu indikator dikatakan *valid* apabila *conterminous* (memiliki batas yang sama; memiliki bidang, konteks atau makna yang sama) dengan konsep yang diwakilinya. Meskipun demikian, kebanyakan indikator sampai taraf tertentu tidak valid. Konsep tersebut mungkin memiliki aspek atau dimensi yang tidak tercakup kedalam indikator, atau indikatornya yang mungkin meliputi sesuatu hal yang tidak termasuk kedalam konsepnya. Bagaimanapun indikator yang cacat seperti ini harus tetap digunakan apabila indikator yang lebih valid belum disusun.

Indikator dapat dikatakan sebagai indikator handal apabila indikator tersebut sampai taraf tertentu selalu menghasilkan skor serupa untuk setiap gejala yang sama. Sebagai prinsip umum, indikator yang didasarkan pada perhitungan (benda atau kejadian) akan menjadi lebih handal dibandingkan dengan indikator yang didasarkan pada respon lisan.

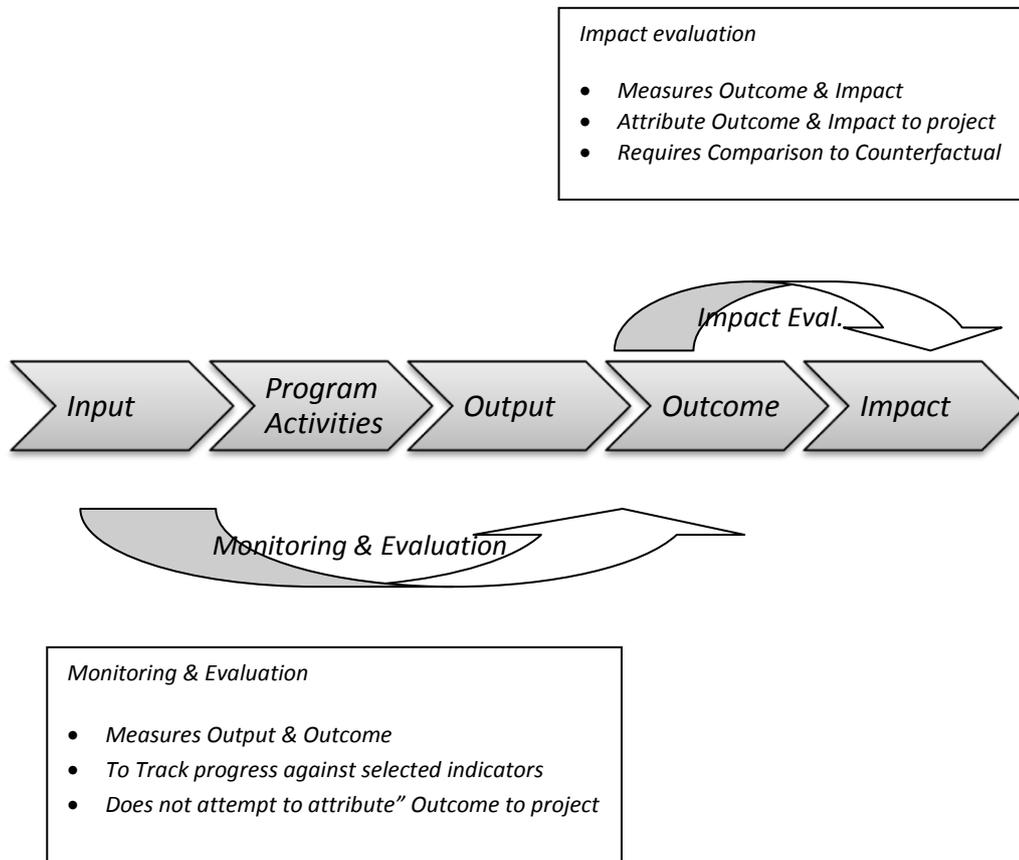
Utilitas merupakan basis ketiga untuk memilih indikator dan mengandung banyak aspek. Salah satu aspek yang penting adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan kepada audiensi. Indikator yang sederhana dan mudah dipahami lebih bermanfaat dibandingkan indikator yang lebih rumit. Familiaritas dengan suatu indikator juga meningkatkan kemampuan indikator untuk dapat terkomunikasikan, sehingga ukuran baku (apabila tersedia) menjadi hal yang sangat didambakan. Ukuran baku mungkin berupa pertanyaan survei sederhana yang digunakan pada riset terdahulu atau berupa suatu indeks yang rumit dalam bentuk kelompok pertanyaan dan kelompok pernyataan berbagai bidang. Ukuran baku berguna karena ukuran tersebut memungkinkan dilakukannya perbandingan hasil riset dengan hasil kajian lainnya.

1.5.1.1. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program

adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Untuk memahami evaluasi program dengan lebih sistematis maka buatlah skema logika program untuk melukiskan berbagai pemahaman hubungan diantara sumber-sumber untuk mengoperasikan program, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, dan perubahan atas hasil yang diharapkan akan terjadi. Logika program juga biasa disebut sebagai Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analisis Evaluation Model*) atau Teori Umum Sistem (*General System Theory*) yang dikembangkan oleh Karl Luwig von Bertalanffy (Wirawan, 2011:107).



Gambar 1.1 Logika program, *Adapted from Gary Woller, 2007* (dalam workshop evaluasi dampak untuk mendukung intervensi sosial berbasis Fakta, Djoko Hartono, Depok : 2011)

Masukan (*input*) melukiskan sumber-sumber yang diperlukan program. Sumber-sumber meliputi antara lain tenaga, keuangan, dan sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program. Aktivitas adalah proses, peralatan, kejadian-kejadian, teknologi, dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program yang disebut juga sebagai intervensi atau perlakuan program. Intervensi ini dipakai untuk menimbulkan perubahan. Keluaran (*output*) program

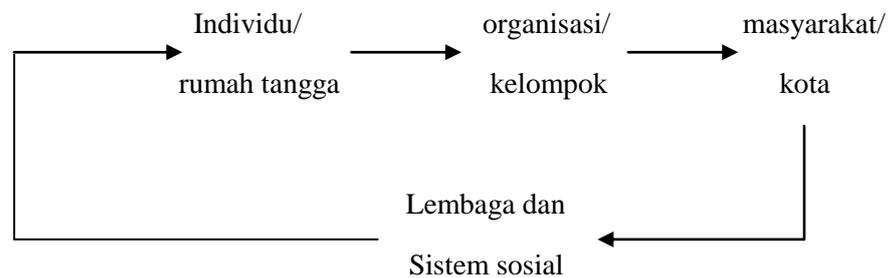
merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program. Pengaruh (*outcomes*) adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan. Pengaruh jangka pendek harus dicapai dalam waktu 1-3 tahun, sedangkan pengaruh jangka panjang harus dicapai 4-5 tahun. Akibat (*Impact*) adalah perubahan yang diharapkan atau tidak yang diharapkan yang terjadi dalam organisasi, masyarakat atau sistem sebagai hasil dari aktivitas program.

1.5.1.2. Evaluasi Dampak

Evaluasi memberikan perhatian yang lebih besar kepada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan dampak perlu dipahami bahwa dampak terdiri atas dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang dimaui dan tak dimaui.

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Studi evaluasi sebaiknya dilakukan lama setelah dampak terjadi, karena ada kemungkinan dampak yang dikira akan muncul pada

jangka panjang ternyata muncul segera setelah program berakhir. Dampak terhadap unit sosial bersifat agregatif dan resiprokal, tidak terpisah satu sama lain. Dampak kebijakan terhadap individu atau rumah tangga akan merembet pada kelompok, tapi sebaliknya dampak yang langsung merembet pada kelompok atau organisasi akan merembet pada individu dan rumah tangga.



Gambar 1.2 Resiprokalitas Dampak Kebijakan, Finsterbusch and Motz (dalam Wibawa,1994:53)

(a) Dampak Individu

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

(b) Dampak organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang langsung berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya, karena misi suatu organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan

tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.

(c) Dampak Terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani anggotanya. Jadi walaupun ingin dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya sebaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjukkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

(d) Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Perubahan yang terjadi dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Dalam menganalisis perubahan sistem sosial selama ini dikenal dua perspektif yang dominan, yakni fungsionalisme dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme mengamati cara sistem sosial mengadaptasi perubahan dengan tetap menjaga strukturnya. Menurut pendekatan ini, seandainya sistem sosial tertuntut untuk melakukan perubahan struktural, nilai dasar dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat.

Dalam evaluasi dampak suatu program harus sangat dicermati bahwa dampak yang terjadi adalah benar-benar sebagai akibat dari program yang

sedang dievaluasi. Hal ini disebabkan sering sekali beberapa program memiliki tumpang tindih, oleh karenanya pengalaman membuktikan tidak mudah mengklaim bahwa suatu dampak sebagai akibat dari program tertentu. Bisa jadi dampak tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program yang berdampingan atau bersinergi. Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994:74) menyebut empat jenis evaluasi program berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Empat Jenis Evaluasi

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program after -Only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single Program before-after</i>	Ya	Tidak	Tak ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>Comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
<i>Comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber : Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:74)

Single after-only merujuk bahwa evaluasi dilakukan hanya mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan. Penelitian ini dianggap sangat lemah karena hanya deskriptif, dan

tidak mampu memberikan kenyataan yang lebih bahwa kebijakan benar-benar telah memberikan dampak bagi kelompok sasaran. Evaluasi *single program before-after* menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding, dimana kekurangan desain ini adalah lemahnya argumentasi apakah kelompok diluar yang diintervensi tidak memiliki hasil atau dampak seperti kelompok sasaran.

Desain yang ketiga adalah *comparative after only* dimana evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi kelompok pembanding. Desain penelitian ini dikatakan baik karena telah memberikan informasi apakah ada perbedaan kondisi kelompok yang diintervensi kebijakan dengan yang tidak. Kelemahan desain penelitian ini adalah bahwa desain penelitian ini tidak dapat memastikan berapa derajat perubahan dari hasil intervensi kebijakan. Desain yang terakhir adalah Evaluasi *Comparative Before After* Menunjuk pada evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi. Desain ini disebut sebagai desain yang terbaik, selain dapat mengukur tingkat perubahan selama dan sesudah, juga dapat dipastikan bahwa hasil dan dampak kebijakan tersebut adalah benar-benar hasil dari kinerja kebijakan.

1.5.2. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara independen untuk menilai proses kegiatan program baik dari aspek efisiensi dan efektifitas kegiatan maupun dampak dari program. Kegiatan evaluasi program PAMSIMAS akan mencakup aspek monitoring kesinambungan (proses partisipasi dan *outcome*), pelaksanaan dan output kegiatan, evaluasi dampak program, dan evaluasi yang meliputi proses, hasil, dan pendanaan. Evaluasi Program PAMSIMAS bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan program sehingga memberi kesempatan kepada pelaksanaan program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dan hasil pemantauan, dengan kata lain evaluasi program berguna untuk melihat apakah intervensi input yang dilakukan telah memberikan dampak sesuai harapan program yang ditetapkan. Jenis-jenis evaluasi yang akan dilakukan dalam Program Pamsimas adalah:

- (a) *Evaluasi Keluaran (Output)*. Dilakukan dengan melihat sejauh mana perubahan yang dialami masyarakat penerima manfaat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program.
- (b) *Survei/Studi Dampak*. Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, serta peran masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

(c) *Studi Khusus/Tematik*. Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi dampak, sejumlah studi tematik dapat dilakukan dalam kurun waktu perjalanan program.

Evaluasi Program PAMSIMAS memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya yakni partisipatif artinya Semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator, dan konsultan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kedua, transparan artinya evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya mudah diakses semua pihak. Ketiga, akurat yakni Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.2.1. Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat

Kinerja pelaksanaan program PAMSIMAS di tingkat masyarakat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

(1) Tujuan umum program

(1.1) Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, pada fasilitas air minum yang layak sebesar 50-100% dari masyarakat yang belum memiliki akses.

(1.2) Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, pada fasilitas sanitasi yang layak sebesar 100% paling lambat pada tahun ketiga setelah pemicuan.

(2) Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal

- (2.1) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) disusun secara partisipatif melibatkan seluruh komponen masyarakat (miskin-kaya; perempuan-laki-laki).
- (3) Komponen 2: Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitas
 - (3.1) 80% masyarakat sasaran berhenti buang air besar sembarangan.
 - (3.2) 80% masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis.
 - (3.3) 95% sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan program PHBS.
- (4) Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
 - (4.1) Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran.
 - (4.2) Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat.

1.5.2.2. Evaluasi Aspek Keberlanjutan Program PAMSIMAS

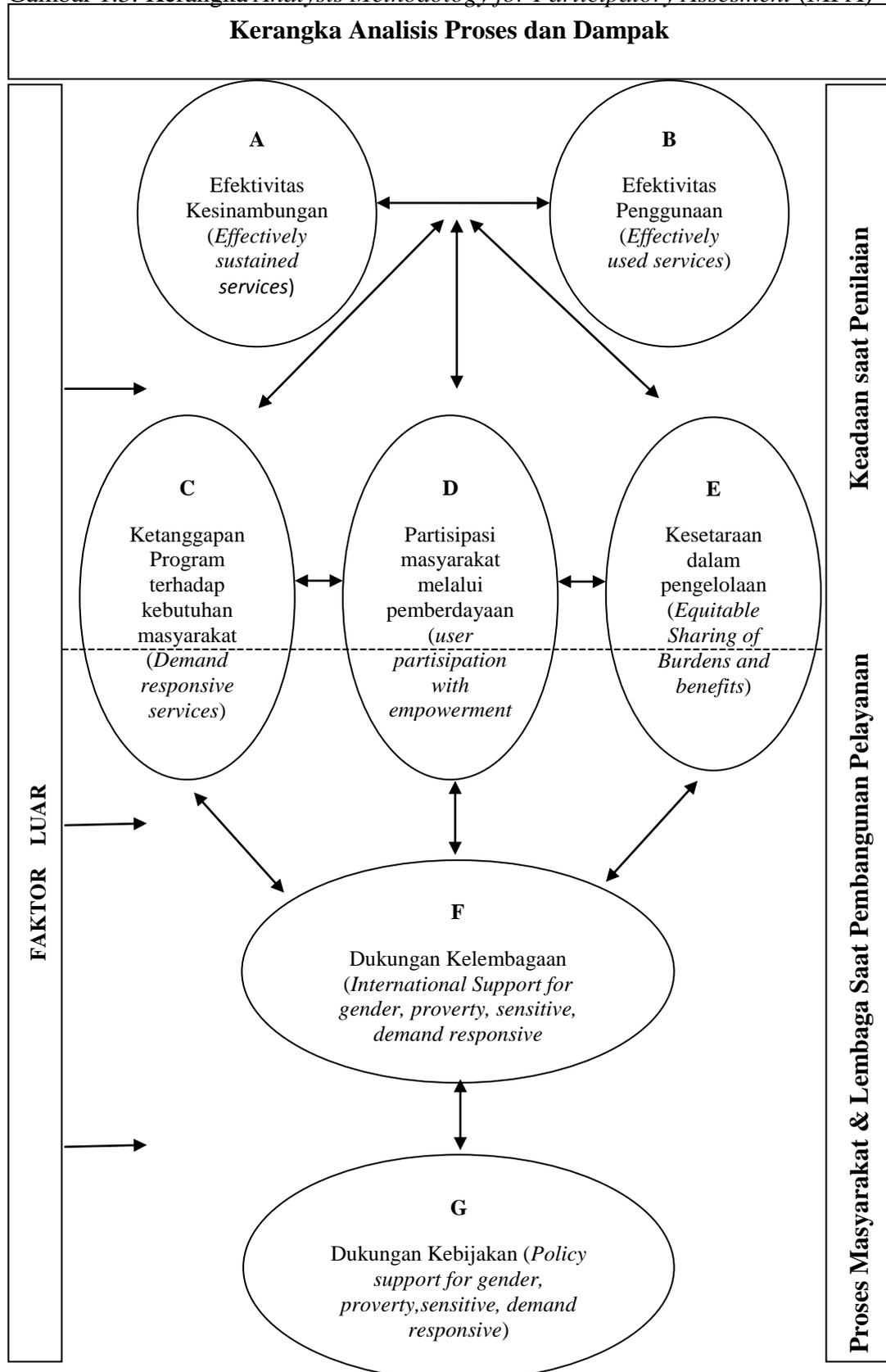
Keberlanjutan atau kesinambungan program dimaknai sebagai sarana terbangun dan perubahan perilaku yang dapat memberikan pelayanan dan manfaat secara menerus dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, pembiayaan, kelembagaan, kesetaraan sosial dan pelestarian lingkungan. Keberlanjutan program PAMSIMAS dilakukan oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator masyarakat. Keberlanjutan menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk dievaluasi karena menyangkut

keberhasilan program PAMSIMAS, dimana dalam keberlanjutan terkandung 6 aspek yang ditinjau meliputi efektivitas kesinambungan, efektivitas penggunaan, ketanggapan program terhadap kebutuhan masyarakat, kesetaraan dalam pengelolaan pelayanan, partisipasi melalui pemberdayaan, dan perilaku sehat.

Aspek keberlanjutan merupakan aspek yang menjadi salah satu permasalahan dalam program PAMSIMAS dan sangat sulit untuk diwujudkan karena keberhasilan keberlanjutan program harus memperhatikan kemampuan para penggunanya menjaga sarana agar tetap berfungsi dan memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Sarana yang ada digunakan dengan efektif bila mudah dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat sasaran dengan memperhatikan aspek kesehatan, serta tanpa ada pengecualian/pembedaan terhadap kelompok tertentu.

Keberlanjutan dalam PAMSIMAS dapat dilakukan berdasarkan kerangka analisis proses dan dampak program yang dikutip dari *Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and Sanitation* (Nilanjana Mukherjee and Christine van Wijk, WSP-IRC: 2003) dalam buku panduan Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PAMSIMAS edisi 2011, terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.3: Kerangka *Analysis Methodology for Participatory Assessment (MPA)*



Kerangka analisis proses dan dampak diatas menunjukkan hubungan antar kompeonen A,B,C,D,E,F, dan G. Masyarakat dikatakan telah menjaga keberlanjutan sarana air minum dan sanitasi tergantung pada:

- (a) Tingkat dimana semua masyarakat (perempuan dan laki-laki), kaya dan miskin, dan juga kelompok umur yang berbeda) mempunyai akses dan menggunakan sarana tersebut
- (b) Tingkat dimana sarana air minum dan sanitasi sesuai demand status semua masyarakat (perempuan, laki-laki, baik kaya dan miskin)
- (c) Cara-cara dimana beban dan masnfaat dan perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi dibagi secara setara diantara semua komponen masyarakat
- (d) Tingkat pasrtisipasi pengguna yang memperhatikan aspek gender dan kemiskinan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi
- (e) Bentuk dukungan lingkungan kelembagaan yang memberikan kemudahan bagi partisipasi masyarakat (perempuan dan laki-laki baik kaya ataupun miskin) dalam pembangunan dan penggunaan sarana air minum dan sanitasi
- (f) Dukungan kebijakan atau bentuk sektor kebijakan dalam program memberikan kemudahan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penggunaan sarana air minum dan sanitasi.

1.6. Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan evaluasi program PAMSIMAS antara lain:

(1) Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan

(1.1) Pelatihan/Sosialisasi Program ditingkat masyarakat

Kegiatan pelatihan menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pelatihan untuk tahap pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih harus sesuai dengan kebutuhan LKM dan masyarakat, agar mampu dan terampil dalam melakukan kegiatan. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sarana dengan cara pendampingan secara terus-menerus oleh tim fasilitator.

(1.2) Pembangunan konstruksi sarana air minum di masyarakat tahap persiapan dan pelaksanaan

Pembangunan konstruksi sarana memanfaatkan organisasi dan sumberdaya yang telah ditentukan, yaitu LKM dan kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja, materi lokal, dan sebagainya.. Selanjutnya masyarakat dan LKM dengan dukungan tim fasilitator secara terus-menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti

pengadaan material, mutu pekerjaan pengelolaan, administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kesinambungan dari sarana yang telah dibangun.

(1.3) Pelatihan dan pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Promosi PHBS ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum wanita dan anak-anak usia sekolah. Hal ini mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh konsultan kesehatan yang disediakan oleh organisasi pelaksana dengan menggunakan metode partisipasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat.

(2) Pengelolaan (Menerus dan Berkala)

(2.1) Pembentukan Badan Pengelola

Terbentuknya badan pengelola yang didasarkan atas musyawarah masyarakat menjadi prioritas utama bagi program PAMSIMAS yang merupakan pengejawantahan minat masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga ketersediaan air minum dan sanitasi lingkungan. Fungsi dan tugas utama BPS adalah untuk mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang terbangun sehingga

memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat. Untuk itu harus selalu dilakukan penyadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana air minum dan sanitasi adalah milik masyarakat setempat.

(2.2) Pemeliharaan dan Pengelolaan prasarana air

Aspek pelestarian kegiatan PAMSIMAS sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan pengelola dalam mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana air, dan disiplin masyarakat/pengguna dalam mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama dalam memanfaatkan air. Pengelola diharapkan mampu melakukan pengoperasian dan pemeliharaan secara tepat. Melalui pengoperasian dan pemeliharaan tersebut diharapkan dapat dicapai umur teknis prasarana dan sarana sesuai rancangan teknis serta standar pelayanan yang disepakati bersama. Sarana harus mampu melayani sasaran atau pengguna dan badan pengelola harus menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayanan sarana sesuai dengan rencana.

(2.3) Kegiatan Kesenambungan dan dampak program

Kegiatan kesinambungan merupakan acuan untuk mengetahui dampak program terhadap masyarakat. PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan, produktivitas dan

kualitas hidup melalui pembangunan sarana air yang terpadu dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tercapainya tujuan tersebut akan menimbulkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat apabila pembangunan sarana air minum, sanitasi dan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

1.7. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu menyangkut bagaimana peneliti melakukan penelitian (Usman, 2009:41).

1.7.1. Desain Penelitian

Menurut Suchman dalam Nazir (2005:84) rancangan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Sedangkan Menurut Rowley:

“Desain penelitian merupakan logika yang menghubungkan data yang akan dikumpulkan dan kesimpulan-kesimpulan yang harus ditarik ke arah pertanyaan-pertanyaan dari studi, desain penelitian terjadinya perpaduan (dalam Wirawan, 2011:147).”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara lain memandang suatu desain penelitian adalah melihatnya sebagai rencana tindakan dari pertanyaan ke kesimpulan. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran sejajar/bersamaan, dimana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dalam

waktu yang sama dan dianalisis untuk saling melengkapi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data numerik dan data naratif dalam menjawab pertanyaan yang sama. Penggunaan desain campuran ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam (*deep and rich*) sesuai dengan persepsi masyarakat.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terletak di beberapa Kelurahan di Kecamatan Tembalang, yaitu kelurahan yang mendapatkan program PAMSIMAS pada tahun kerja 2008 dan tahun 2009, dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun Kelurahan tersebut adalah: Kelurahan Rowosari untuk program kerja tahun 2008 dan Kelurahan Bulusan, Kelurahan Tembalang, dan Kelurahan Mangunharjo untuk program kerja tahun 2009.

1.7.3. Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Oleh karena itu, seorang informan harus benar-benar tahu atau merupakan pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih informan harus dilihat dari kompetensinya bukan hanya sekedar untuk

menghadirkannya. Oleh karena itu diperlukan teknik sampling yang tepat sehingga informan yang diperoleh benar-benar orang yang tepat.

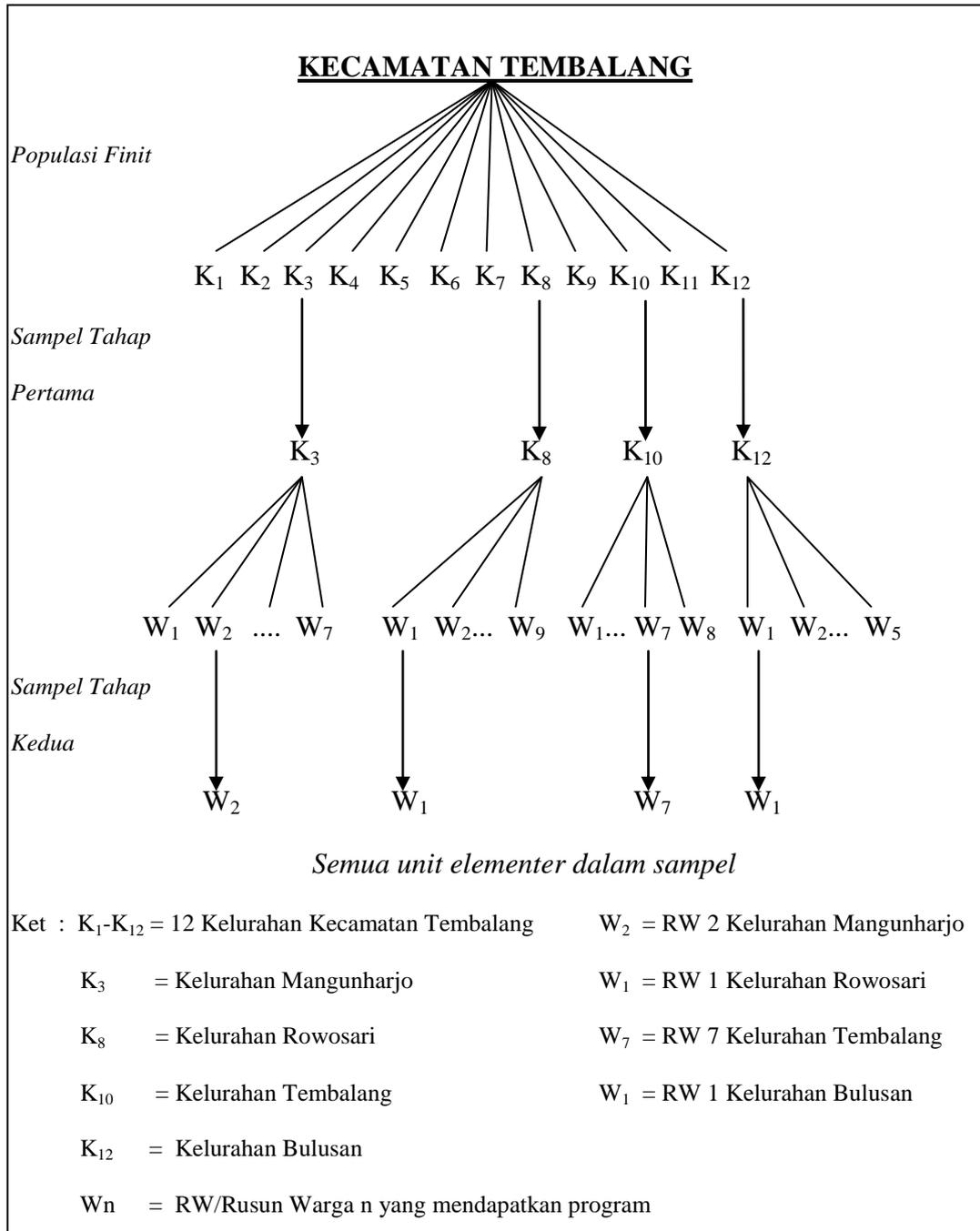
Adapun teknik sampling yang dipakai penulis adalah Teknik *Cluster Sampling* yakni populasi yang tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya (Usman, 2009:44). Populasi dari cluster merupakan subpopulasi dari total populasi. Unsur-unsur dalam *cluster* sifatnya tidak homogen, yang berbeda dengan unit-unit elementer dalam strata. Tiap cluster mempunyai anggota yang heterogen menyerupai populasi sendiri. Adapun populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tembalang yang mendapatkan program PAMSIMAS. Untuk menemukan jumlah sampel yang tepat digunakan *Two Stage Cluster Sampling*, terlihat dalam tahap berikut:

- (1) Dari data sekunder pada kantor kecamatan tembalang diperoleh keterangan bahwa terdapat 12 Kelurahan dalam Kecamatan Tembalang dengan perkataan lain $M=12$
- (2) Peneliti secara random memilih psu sebagai sampel dengan menggunakan sampel *fraction* 30%. Jumlah psu sampel pertama dicari dengan rumus:

$$m = f \times M$$

$f = 0,30$; $M = 12$; maka : $m = 0,30 \times 12 = 4$. Jumlah psu dalam sampling pertama adalah 4 Kelurahan.

Gambar 1.4 : Two Stage Cluster Sampling Kecamatan Tembalang



- (3) Peneliti akan menarik secara random 4 buah psu (kelurahan) dari 12 Kelurahan yaitu K₃ (Kel. Mangunharjo), K₈ (Kel. Rowosari), K₁₀ (Kel. Tembalang), dan K₁₂ (Kel. Bulusan).

- (4) Mencari jumlah penduduk yang ada dari tiap kelurahan yang terpilih, atau dengan kata lain mencari jumlah masyarakat yang ada pada 4 psu. Menggunakan daftar yang ada di kantor kecamatan, maka diketahui bahwa:

$$K_3 \text{ (Kel Mangunharjo)} = 103 \text{ KK}$$

$$K_8 \text{ (Kel Rowosari)} = 256 \text{ KK}$$

$$K_{10} \text{ (Kel. Tembalang)} = 124 \text{ KK}$$

$$K_{12} \text{ (Kel. Bulusan)} = 232 \text{ KK}$$

- (5) Tidak semua masyarakat yang mendapatkan program tersebut akan dijadikan Partisipan. Tetapi dari sini akan ditarik lagi sampel tahap kedua dimana peneliti menginginkan 108 Partisipan, untuk itu digunakan sampel fraction 15%. Jumlah masyarakat dari masing-masing kelurahan diatas akan menjadi informan adalah:

$$N_1 = 0,15 \times 103 = 16 \text{ KK untuk } K_3$$

$$N_2 = 0,15 \times 256 = 38 \text{ KK untuk } K_8$$

$$N_3 = 0,15 \times 124 = 19 \text{ KK untuk } K_{10}$$

$$N_4 = 0,15 \times 232 = 35 \text{ KK untuk } K_{12}$$

Besar sampel untuk tahap kedua adalah

$$n = y = \sum_{i=1}^m ni$$

$$= 16 + 38 + 19 + 35$$

$$= 108 \text{ KK}$$

1.7.4. Jenis Data

Penelitian kualitatif dalam menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang mempermudah pengertian. Secara khusus penelitian ini menggunakan data yang terbentuk dari kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata yang dibagi kedalam 2 bentuk yaitu data nominal dan data ordinal.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, tempat dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(a) **Data Primer**

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya (Warsito, 1997: 69). Di dalam hal ini, peneliti sebagai pengumpul data dan untuk mengumpulkan data primer menggunakan metode wawancara dan observasi yang bersumber langsung dari subjek penelitian.

(b) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain (Warsito, 1997: 69). Jadi data sekunder merupakan informasi yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya yaitu meliputi dokumen, laporan monografi, browser, buklet, literatur serta sumber-sumber lainnya.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan memakai kedua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sesuai dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sesuai persepsi masyarakat. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam penelitian adalah:

(a) Wawancara Terbuka dan Tertutup

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang memberi kesempatan interaksi satu persatu antara peneliti dan individu-individu yang sedang dikaji. Wawancara memiliki peluang untuk bertanya guna mengklarifikasi jika pertanyaan tampak samar-samar atau guna memberi klarifikasi jika pertanyaan tidak jelas. Wawancara lebih sering digunakan sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif daripada penelitian kuantitatif, namun demikian sesungguhnya wawancara tersebut adalah suatu rangkaian kesatuan, berkisar dari tidak berstruktur dan terbuka ke

yang sangat terstruktur dan tertutup. Wawancara kualitatif tradisional ditempatkan pada sisi dari rangkaian kesatuan sementara wawancara kuantitatif tradisional pada sisi lainnya.

Wawancara kualitatif berupa arahan dan sangat umum, sementara wawancara kuantitatif tradisional lebih terstruktur dan biasanya bersifat tertutup. Wawancara terbuka digunakan di awal penelitian untuk menangkap persoalan ketika informasi belum tersedia. Wawancara terbuka digunakan untuk mendapatkan keterangan berkaitan dengan objek penelitian. Pernyataan ini kemudian digunakan dalam wawancara yang lebih terstruktur atau bentuk kuesioner guna mengukur sikap atau pendapat masyarakat.

(b) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dijadikan informasi oleh penulis adalah berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Usman, 2009:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi

menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Analisis data kualitatif menyangkut identifikasi apa yang menjadi perhatian (*Concern*) dan apa yang menjadi persoalan (*Issues*). Dalam melakukan identifikasi ini ada bebarap proses yang perlu dilakukan :

(1) Proses Kategorisasi

Yakni proses menyusun kembali catatan dari hasil observasi atau wawancara menjadi yang lebih sistematis. Pada penelitian kualitatif kategorisasi dimaksudkan (Alwasilah, 2011:115-116):

(1.1) Dalam penelitian kualitatif, frekuensi kemunculan butir-butir temuan dari lapangan tidaklah sepenting kategorisasi. Dengan kata lain, frekuensi itu perlu diketahui sebagai batu loncatan membangun kategorisasi

(1.2) Pemberian kode pada temuan dikandung maksud untuk meringis-iris temuan dan mengelompokkannya dalam kategori-kategori untuk memudahkan peneliti melakukan perbandingan temuan dalam satu kategori atau silang kategori

(1.3) Perbandingan temuan-temuan itu dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep teoritis.

(2) Proses Prioritas

Apabila terdapat banyak sekali kategori, perlu ada prioritas nama kategori yang dapat ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan karena terlalu banyak kategori akan menyulitkan dalam interpretasi. Kategori yang diprioritaskan adalah kategori yang:

- (2.1) Paling sering muncul (*Modus*)
 - (2.2) Oleh beberapa orang dianggap sebagai yang paling dipercaya
 - (2.3) Merupakan hal yang unik atau memiliki ciri khas tersendiri
 - (2.4) Membuka peluang adanya kemungkinan penyelidikan lebih lanjut
 - (2.5) Material atau berharga
- (3) Proses penentuan kelengkapan

Jumlah atau jenis kategori dianggap sudah layak apabila secara logika rangkaian kategori dapat diterima dengan kata lain, permasalahan yang muncul dapat menjawab permasalahan yang menjadi perhatian, berarti kategori yang dikumpulkan belum cukup.

Selanjutnya untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dalam kategori tertentu, dibuatlah pengelompokan data/tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi/banyaknya item/obyek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat. Dalam penelitian kualitatif penyajian data distribusi frekuensi dilakukan dalam bentuk Tabel Frekuensi Kualitatif yaitu dengan pembagian yang didasarkan atas kategori-kategori tertentu, penyajian datanya dapat berbentuk tabel, diagram lingkaran, dan diagram batang.

Karena penelitian ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh program PAMSIMAS berdasarkan persepsi masyarakat terhadap program melalui jajak pendapat atau wawancara, diperoleh data tentang sikap atau pendapat sekelompok orang ada yang mengatakan sangat baik, baik,

ragu-ragu, tidak baik, ataupun sangat tidak baik, dimana jarak antara pernyataan tersebut tidak jelas besar perbedaannya dan belum tentu sama setiap informan. Dengan demikian untuk menemukan kesimpulan data yang tepat secara kualitatif digunakanlah ukuran pemusatan untuk mengetahui sebaran data yang sering disebut sebagai modus atau nilai/kategori/ fenomena yang paling sering/banyak terjadi) tanpa menghilangkan hasil wawancara yang bersifat penting.

1.7.8. *Kualitas Data*

Pengukuran data kualitatif melibatkan pemberian label dan/atau deskripsi naratif guna mengidentifikasi perbedaan kelompok atau peristiwa, orang, situasi, dan/atau perilaku. Dengan memberikan label kualitatif/deskripsi atau tingkatan kuantitatif (penomoran) terhadap perbedaan nilai atau peristiwa, dapat mengidentifikasi nilai perbedaan atau tingkatan tersebut dan merekamnya untuk proses berikutnya. Pengukuran kualitatif lebih sering didasarkan pada klasifikasi dalam kategori yang muncul atau penjelasan-penjelasan.

Lincoln dan Guba (dalam Tashakkori, 2010:149) memperkenalkan empat kriteria (kemampuan untuk dipercaya, dipindahkan, diandalkan, dan kemampuan untuk menegaskan) yang secara kolektif dapat dikombinasikan untuk menentukan layak dipercayainya suatu penelitian. Metode berbeda untuk menentukan layak dipercayainya hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui:

- (a) Memperpanjang waktu kerja penelitian, bahwa peneliti menggunakan jumlah waktu yang cukup untuk pengkajiannya untuk membangun kepercayaan, mempelajari “kebudayaan”, dan menguji informasi yang sudah baik dari informasi atau dari bias sendiri.
- (b) Pengamatan terus-menerus, dengan tujuan mendapatkan “kedalaman” informasi bagi peneliti dengan menolungnya mengidentifikasi karakteristik atau aspek sosial yang paling relevan dengan pertanyaan yang sedang dicari.
- (c) Kecukupan referensi, melibatkan penyimpanan arsip beberapa data mentah kualitatif untuk diolah dan dianalisis kembali
- (d) Menggunakan teknik Triangulasi data, dalam buku metode evaluasi dan penelitian kualitatif yang berpengaruh (Patton, 2009:99) triangulasi data adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda dengan titik pandang yang berbeda. Triangulasi data ini diperlukan karena peneliti menggunakan triangulasi metodologis dimana penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen.

BAB III

IDENTITAS PARTISIPAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Identitas Partisipan (Metode Pengumpulan Data Daftar Pertanyaan)

Adapun identitas dari partisipan yang diuraikan dan akan dibahas meliputi: umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Untuk mengetahui gambaran umum tentang keadaan partisipan dalam penelitian ini akan disajikan beberapa tabel yang berisi identitas partisipan yang terdiri atas:

3.1.1. Deskripsi Partisipan Berdasarkan Umur

Tabel 3.1

Partisipan Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	%
1	21- 30	28	25,9
2	31-40	42	38,9
3	41-50	24	22,2
4	51-60	14	13
	Jumlah	108	100

Diolah dari jawaban daftar pertanyaan II No 3

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa partisipan dalam penelitian ini mayoritas berusia 38,9% atau 42 partisipan. Berikutnya kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 28 partisipan atau 25,9%, kelompok umur 41-50 tahun 24 tahun sebanyak 22,2%, dan yang terakhir kelompok umur 51-60 tahun dengan 14 partisipan atau 13%.

3.1.2. Deskripsi Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2
Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	53	49
2	Perempuan	55	51
	Jumlah	108	100

Diolah dari jawaban daftar pertanyaan II no 4

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa dari total 108 partisipan, sebahagian besar berjenis kelamin perempuan yakni 55 partisipan atau sebesar 51%. Tapi tidak berbeda jauh dengan jumlah partisipan perempuan, jumlah partisipan laki-laki sebanyak 53 partisipan atau 49%.

3.1.3. Deskripsi Partisipan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 3.3
Partisipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	37	34,3
2	SLTA	23	21,2
3	SMA	37	34,3
4	D1	1	0,9
5	D3	3	2,8
6	S1	7	6,5
	Jumlah	108	100

Diolah dari jawaban daftar pertanyaan II No 5

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 108 partisipan terdapat 37 partisipan atau 34,3% berpendidikan terakhir SMA, sebanyak 37 partisipan atau 34,3% berpendidikan terakhir SD, 23 partisipan atau 21,2% berpendidikan terakhir SLTA, sebanyak 1 partisipan atau 0,9% berpendidikan terakhir D1, sebanyak 3 partisipan atau 2,8% berpendidikan terakhir D3, dan sebanyak 7 partisipan atau 6,5% berpendidikan terakhir S1.

3.2. Identitas Partisipan (Metode Pengumpulan Data Wawancara)

Tabel 3.4

Identitas Partisipan yang Diwawancarai

NO	NAMA	PEKERJAAN	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Sutarno	Ketua RW 7 Kelurahan Tembalang	50 Tahun	S1
2	Djumani	Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan	52 Tahun	SD
3	Ismail	BPS Kelurahan Mangunharjo	39 Tahun	S1
4	Ngatmin	Ketua RW 1 Kelurahan Rowosari	56 tahun	SD
5	Boyadi	BPS pertama Kelurahan Tembalang	48 Tahun	SLTA
6	Anis Analisa	Usaha Laundry	31 Tahun	D3
7	Suswandito	Pekerja Bangunan	32 Tahun	SLTA

3.3. Penyajian Data

3.3.1. Fenomena Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan dan pengawasan PAMSIMAS disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang mendapatkan program. Pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS tersebut diarahkan untuk sepenuhnya mendukung peningkatan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kegiatan pembangunan sarana air minum masyarakat yang bersifat komunal melalui beberapa tahapan sosialisasi.

3.3.1.1. Sosialisasi Program di Masyarakat

3.3.1.1.1. Banyaknya Sosialisasi/Penyuluhan

Sosialisasi program dilakukan oleh aparat kelurahan dengan peserta masyarakat yang akan dilibatkan dalam program. Inti dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengerti tentang proyek dan ikut berperan serta. Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan adanya sosialisasi yang diikuti partisipan:

Tabel 3.5

Banyaknya Sosialisasi/Penyuluhan

di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	≥ 5 kali	16	14,8
2	3-4 kali	16	14,8
3	1-2 Kali	69	63,9
4	Tidak ada	7	6,5
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 1

Tabel 3.5 diatas menunjukkan dari total 108 partisipan bahwa banyaknya sosialisasi/penyuluhan mayoritas diterima sebanyak **1-2 kali**, dimana rincian per kategori sebagai berikut: yang memilih kategori 3-4 kali dan ≥ 5 kali masing-masing 16 partisipan atau 14,8 %, Selanjutnya sebanyak 7 partisipan atau 6,5% mengatakan tidak ikut sosialisasi, Kategori 1-2 kali paling banyak dipilih yakni sekitar 69 atau 63,9% partisipan.

Kategori 1-2 kali dipilih oleh kebanyakan partisipan dengan alasan bahwa sosialisasi diterima saat pertemuan di kelurahan yang berupa pemberitahuan pemasangan air, seperti yang disampaikan oleh Pak Suswandito (Tukang Bangunan, 32 Tahun) pada tanggal 24 Februari 2012:

“Kalau seingat saya ya mbak, memang pernah ikut kalau tidak salah satu atau dua kali pas pertemuan RW ngomongnya dapat bantuan air, jadi ya kita ikut pasang.”

Walaupun mayoritas partisipan memilih kategori satu sampai dua kali, namun ditemukan fakta yang berbeda melalui wawancara yang dilakukan dengan BPS pertama Kelurahan Tembalang, Bapak Boyadi 48 tahun pada tanggal 19 Februari 2012 yakni:

“secara teknik saya tau persis PAMSIMAS ini mbak, soalnya saya pengelola pertama. Sosialisasi saya ikuti 3-4 kali dan itu dilakukan cukup intens kepada masyarakat.”

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua RW 7 Kelurahan Tembalang, Bapak Sutarno pada tanggal 18 Februari 2012:

“sosialisasi memang dilakukan berkali-kali sampai 5 kali mbak ya materinya tentang kualitas dan kegunaan air bersih, kalau yang sepengamatan saya masyarakatnya pahamlah gak sulit gitu dipahami.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas ditemukan bahwa menurut pelaksanaan program ditingkat kelurahan, BPS dan RW setempat, sosialisasi dilakukan bukanlah satu atau dua kali melainkan dalam *range* tiga sampai 5 kali. Sementara kebanyakan masyarakat mengatakan mengikuti sosialisasi hanya satu sampai dua kali saja.

3.3.1.1.2. Pemahaman Terhadap Sosialisasi

Penyampaian informasi melalui pendekatan dan mengikutsertakan tokoh masyarakat merupakan salah satu cara yang digunakan oleh tim pelaksana program agar materi sosialisasi mudah dipahami oleh masyarakat. Berikut ini disajikan data mengenai sejauh mana tingkat pemahaman partisipan terhadap program:

Tabel 3.6
Pemahaman Terhadap Sosialisasi
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Paham	4	3,7
2	Paham	61	56,5
3	Cukup Paham	35	32,4
4	Tidak Paham	8	7,4
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 2

Dalam tabel 3.6 terlihat mayoritas partisipan yakni 61 atau sekitar 56,5% memilih **paham** terhadap sosialisasi yang diberikan bahkan 4 partisipan atau 3,7% memilih kategori sangat paham dan 8 partisipan atau 7,4% memilih kategori tidak paham. Tingkat pemahaman partisipan terhadap sosialisasi merupakan pertanyaan lanjutan dari kemudahan materi sosialisasi yang diperoleh, alasan partisipan memilih kategori diatas dengan alasan sama bahwa penyampaian sosialisasi mudah dipahami dan dilakukan beberapa kali.

Sesuai dengan prinsip “berbasis masyarakat”, masyarakat memiliki peran strategis dan tanggungjawab penuh dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan, mengoperasikan, serta memelihara sarana dan prasarana air. Oleh karena itu, sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat memiliki kepaahaman untuk nantinya mengelola sarana yang dibangun, seperti yang diperkuat oleh pernyataan Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan Pak Djumani, pada tanggal 24 Februari 2012:

“Ya pertama kalinya banyak yang gak nangkap mbak untuk PAMSIMAS tapi setelah berjalan pertemuan 3 kali baru mereka sudah tau oh begini.... sudah direpson gitu, untuk masyarakat tergolong sulit-sulit sedikit. Kalau untuk penyuluhan itu ya pertamanya banyak mbak mungkin sampe pertemuan kedua ketiga, akhirnya sampe merasakan PAMSIMAS jadi banyak yang tau jadi semakin lama semakin paham.”

Menurut hasil pengumpulan data diatas bahwa mayoritas masyarakat berpendapat materi penyuluhan sosialisasi mudah dipahami dikarenakan adanya penyampaian informasi secara terus menerus dan berangsur-angsur dari pelaksana program, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara diatas.

3.3.1.1.3. Pengetahuan Tentang Spesifikasi Program

Karakteristik masyarakat di Kecamatan Tembalang sangat beragam baik dari segi latar belakang pendidikan ataupun keterampilan, oleh karena itu sangat mungkin terjadi perbedaan pengetahuan akan spesifikasi program ditambah lagi adanya tuntutan kepada masyarakat untuk mengikuti sosialisasi sesering mungkin. Berikut ini merupakan data yang menunjukkan berbagai kategori pengetahuan partisipan tentang spesifikasi program:

Tabel 3.7
Pengetahuan Tentang Spesifikasi Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Mengetahui	5	4,6
2	Mengetahui	34	31,5
3	Cukup Mengetahui	28	26
4	Tidak Mengetahui	41	38
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 3

Melalui tabel 3.7 diatas dapat dikatakan bahwa kategori **tidak mengetahui** merupakan kategori yang paling banyak dipilih partisipan, yakni dengan frekuensi 41 partisipan atau 38% dari total seluruhnya. Pengetahuan tentang spesifikasi program merupakan indikator yang memang sewajarnya diketahui oleh seluruh masyarakat, namun karena keterbatasan waktu sosialisasi dan sulitnya menyatukan seluruh persepsi masyarakat maka kebanyakan partisipan tidak mengetahui keseluruhan program mulai dari asal-usul pendanaan, rencana kerja, pelaksanaan, pengelolaan sampai tahap

keberlanjutan. Demikian yang disampaikan oleh Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“saya pribadi merasa hal mengetahui spesifikasi program bukanlah keharusan ya, soalnya kan sudah ada pengelolanya sendiri, paling hanya sekedar tau saja pas proses mau pasang air dan masalah iurannya, tapi kalau secara keseluruhan dari awalnya bagaimana saya tidak mengetahui mbak.”

Tapi tidak kalah banyaknya terdapat 34 partisipan yakni sebesar 31,5% mengatakan mengetahui spesifikasi program karena aktif menanyakan perkembangan program dalam rapat bulanan (terutama dipilih oleh laki-laki). Pada umumnya partisipan tersebut merupakan mereka yang dipilih sebagai pengelola setelah terbentuknya sarana, seperti pernyataan dari BPS pertama Kelurahan Tembalang, Bapak Boyadi 48 tahun pada tanggal 19 Februari 2012 yakni:

“secara spesifik saya cukup mengetahui mulai dari materi dana yang dibutuhkan sampai berhubungan ke kelurahan bersama teman-teman yang lain dan ketua RW sini sekaligus memberikan sosialisasi mengelola sarana kepada masyarakat.”

Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa mayoritas partisipan memilih kategori tidak mengetahui secara spesifik mengenai program karena bukan merupakan bagian tugas dan keharusan bagi partisipan, walaupun demikian yang tak kalah penting adalah alasan sebahagian partisipan memilih kategori Mengetahui dikarenakan keaktifannya dalam sosialisasi.

3.3.1.2. *Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Konstruksi di Masyarakat*

3.3.1.2.1. **Mutu Pekerjaan Sarana**

Dalam mewujudkan sarana yang berkelanjutan maka dalam proses pembangunan harus memperhatikan banyak hal baik itu mutu barang dan mutu jasa yang dipakai. Oleh karenanya dibawah ini disajikan tabel yang berisi pendapat partisipan mengenai mutu pekerjaan konstruksi:

Tabel 3.8
Mutu Pekerjaan Sarana Konstruksi
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	2	1,8
2	Baik	69	63,9
3	Cukup Baik	34	31,5
4	Tidak Baik	3	2,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 4

Tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 69 partisipan atau 63,9% mayoritas menyatakan mutu pekerjaan sarana **baik**, terlebih 2 partisipan atau 1,8% merasa mutu pekerjaan sarana konstruksi selama ini sangat baik tidak ada masalah, selanjutnya terdapat 34 partisipan atau 31,5% merasa mutu pekerjaan sarana konstruksi cukup baik dan sebanyak 3 partisipan atau 2,8% menyatakan tidak baik. Mutu /kualitas pekerjaan sarana konstruksi dikatkan terlihat dari tower/tandon air sumur bor dan pipa-pipa saluran air yang dialirkan ke masyarakat dalam kondisi baik karena

dikerjakan oleh orang-orang yang berpengalaman, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua RW 7 Kelurahan Tembalang, Bapak Sutarno pada tanggal 18 Februari 2012:

“Mutu konstruksinya tergolong baik ya kar’na dikerjakan orang-orang berpengalaman, sampai saat ini masih bisa lancar dapat digunakan sesuai rencana yang ditetapkanlah mbak.”

Senada dengan yang diutarakan oleh Bapak Sutarno, Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan Pak Djumani, pada tanggal 24 Februari 2011 menyebutkan:

“Konstruksi cukup baiklah mbak selama ini sudah jalan 2 tahun, ya istilahnya kita pembenahan tiap 1 tahun sekali seperti pengurusan, pengangkatan mesin.”

Menurut hasil pengumpulan data diatas bahwa mayoritas masyarakat berpendapat pekerjaan konstruksi dilakukan dengan baik diperkuat dengan hasil wawancara diatas bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman.

3.3.1.2.2. Kesesuaian Biaya dengan Kemampuan Masyarakat

Air bersih yang tersedia di masyarakat merupakan perwujudan nyata dari program PAMSIMAS dan tidak hanya sekedar membangun sarana namun masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk bermusyawarah menentukan biaya penggunaan air per meter kubiknya beserta angsuran awal. Berikut hasil pengumpulan data yang dikumpulkan mengenai kesesuaian biaya dengan kemampuan masyarakat:

Tabel 3.9
Keseuaian Biaya dengan Kemampuan Masyarakat
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	2	1,8
2	Sesuai	85	78,7
3	Cukup Sesuai	18	16,7
4	Tidak Sesuai	3	2,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 5

Melihat tabel 3.9 diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas partisipan memilih kesesuaian biaya dengan kemampuan masyarakat adalah **sesuai** yakni dengan frekuensi 85 atau 78,7% partisipan. Sebanyak 2 partisipan atau 1,8% memilih sangat sesuai. Selanjutnya sebanyak 18 partisipan atau 16,7% mengatakan biaya cukup sesuai dengan kemampuan finansial dan kategori tidak sesuai dipilih oleh 3 partisipan atau 2,8% dengan pendapat bahwa biaya pemasangan sarana Rp 300.000 terlalu mahal dan selain itu adanya beban abodemen Rp 5.000 per bulan.

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pembuatan perdana pembangunan PAMSIMAS dirasa sangat sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat selain itu biaya per meter airnya yang rata-rata Rp1000 dirasa tidak memberatkan, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Anis Analisa pada 18 Februari 2012 (Usaha Laundry, 31 tahun):

“awalnya diberitahukan oleh RW ada bantuan air PAMSIMAS jadi tiap rumah disini rata-rata memakai. Biaya pemasangan pertama buat pipanya dipungut Rp 400.000, kalau per m³ nya bayar Rp 1000. Tergolong murah sih mbak, bayar pemasangan pipa juga bisa diangsur.”

Melalui penyajian data diatas dapat diketahui bahwa biaya yang dipungut untuk pelaksanaan program tergantung kepada kehidupan finansial partisipan, namun mayoritas memilih bahwa pungutan untuk pelaksanaan program tergolong murah.

3.3.1.2.3. Sasaran Penerima Pembangunan PAMSIMAS

Sebagai program yang memberikan bantuan sarana air bersih kepada masyarakat, PAMSIMAS dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya dalam daftar daerah penerima bantuan. Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan sasaran penerima pembangunan PAMSIMAS menurut masyarakat Kecamatan Tembalang:

Tabel 3.10
Sasaran Penerima Pembangunan PAMSIMAS
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Semua Kalangan	103	95,4
2	Miskin	3	2,8
3	Ekonomi-Menengah	2	1,8
4	Kaya	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 6

Tabel 3.10 menunjukkan sasaran penerima pembangunan PAMSIMAS adalah **semua kalangan** yakni sebanyak 103 partisipan atau sekitar 95,4% dengan alasan bahwa pemasangan air PAMSIMAS diberikan kepada kelurahan yang tidak mendapatkan sarana air PDAM dan bantuan sejenis, dimana sebelumnya setelah melalui *longlist* dan *shotlist* masyarakat tersebut membuat rencana kerja untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Selain itu daerah yang mendapatkan program memang merupakan masyarakat yang membutuhkan, jadi siapapun masyarakatnya asalkan sudah sesuai dengan lingkup daerah yang telah ditentukan berhak mendapatkan manfaat dari PAMSIMAS, tinggal dipasang saluran air saja selama itu mencukupi kapasitas. Selebihnya sebanyak 3 partisipan atau 2,8% memilih kategori miskin dan 2 partisipan atau 1,8% memilih ekonomi menengah, sementara itu yang memilih golongan kaya *zero* partisipan.

3.3.1.2.4. Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Program

Selama pelaksanaan program masyarakat dan pemerintah bekerjasama demi keberhasilan program, karenanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tim pelaksana program melakukan serangkaian pengawasan terhadap pembangunan sarana. Hal ini ditanggapi beragam oleh masyarakat yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Setiap Kali Kegiatan	9	8,3
2	Sering	69	63,9
3	Jarang	26	24,1
4	Tidak Pernah	4	3,7
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 7

Melalui tabel 3.11 dapat dilihat sebanyak 69 partisipan atau 63,9% mayoritas menyatakan monitoring kemajuan pelaksanaan program dalam kategori **sering**, sebanyak 9 partisipan atau sekitar 8,3% memilih kategori setiap kali kegiatan, sebanyak 26 partisipan atau 24,1% memilih kategori Jarang, dan sebanyak 4 partisipan atau 3,7% menyatakan tidak pernah melihat adanya pengawasan dari pemerintah ataupun pengelola.

Adanya pengawasan dari pemerintah daerah ataupun dari kelurahan diakui oleh partisipan sering dilakukan, hal ini diperkuat dengan pernyataan BPS Kelurahan Mangunharjo tanggal 02 Maret 2012 mengatakan bahwa:

“pengawasan di kelurahan ini dari provinsi sudah 3 kali mbak, tanggapan masyarakat ya cukup senang ada yang mengawasi kalau ada hal yang buruk bisa diatasi.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas, dapat diungkapkan bahwa pengawasan selama pengalaman partisipan melihat dari pihak pengelola ataupun pemerintah melakukan pengawasan selama proses pelaksanaan pembangunan program.

3.3.1.2.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tim fasilitator kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya keberhasilan program. Masyarakat berpartisipasi tidak hanya mendengar namun ikut melakukan dan mengawasi perkembangan program. Berikut dapat dilihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program:

Tabel 3.12
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Selalu Ikut Serta	9	8,3
2	Sering Ikut Serta	10	9,3
3	Pernah Ikut Serta	37	34,3
4	Tidak Pernah Ikut	52	48,1
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 8

Pada tabel 3.12 partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mayoritas memilih kategori **tidak pernah ikut serta** yakni sebanyak 52 partisipan atau 48,1%, sebanyak 37 atau 34,3% partisipan mengatakan pernah ikut serta. Selanjutnya Sebanyak 10 partisipan atau 9,3% menyatakan sering ikut serta dan 9 orang atau 8,3% menyatakan selalu ikut serta. Kebanyakan berpendapat tidak pernah ikut serta dalam pelaksanaan program diperkuat dengan pernyataan dari Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“Kalau yang saya tau kan proses pelaksanaannya sudah ada orang-orang dibidangnya ya, kalau ketua RW/RT bisa saja ikut, tapi kan masyarakat awam tidak tahu menau, malah ikut-ikutan salah jadi brabe. Kalau kita paling bantu-bantu waktu pemasangan saluran pipa yang didepan rumah saja.”

Melalui pernyataan diatas diketahui bahwa mayoritas partisipan tidak ikut serta dalam pelaksanaan program disebabkan persepsi bahwa proses pelaksanaan pembangunan merupakan tanggungjawab organisasi pelaksana.

3.3.1.2.6. Permasalahan Selama Pelaksanaan Program

Banyaknya stakeholder yang dilibatkan dalam program ini menyebabkan tidak seluruh pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya ditetapkan. Terjadinya gesekan baik itu dari masyarakat ataupun pemerintah daerah dan pelaksana program membawa pengaruh terhadap hasil program. Berikut ini pendapat masyarakat mengenai sering tidaknya permasalahan timbul selama pelaksanaan program:

Tabel 3.13
Permasalahan Selama Pelaksanaan Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Sering	2	1,8
2	Sering	38	35,2
3	Jarang/Sesekali	27	25
4	Tidak Pernah	41	38
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 9

Tabel 3.13 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih permasalahan selama pelaksanaan program **tidak pernah** yakni dengan 38 partisipan atau 38%, sebanyak 38 partisipan atau 35,2% memilih kategori permasalahan selama pelaksanaan program sering, dan 27 partisipan atau 25%. Selain itu, 2 partisipan atau 1,8% mengatakan permasalahan selama pelaksanaan program sangat sering terjadi. Kategori tidak pernah terjadi masalah menjadi pilihan mayoritas karena secara keseluruhan pelaksanaan program baik-baik saja, kalau pun ada permasalahan gangguan air karena cuaca cukup wajar karena diluar kemampuan manusia. Namun yang menarik adalah frekuensi kategori sering terjadi yakni 38 partisipan atau 35,2% yang diperkuat dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Sutarno sebagai ketua RW 7 Kelurahan tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“Wah kalau disini sering terjadi mbak waktu pelaksanaannya banyak material yang susah dibuang jadi awalnya itu airnya ya seperti ada bau besinya trus ada yang bilang juga kalau kedalaman airnya tidak sesuai, terlampau dalam jadi airnya malah campur lumpur agak kurang jernih awalnya mbak. Masyarakat yang rumahnya lebih tinggi malah gak kebagian air apalagi kalau kemarau, itu kan besar pipanya sama semua malah airnya gak lancar mbak, kalau dibedakan besar-kecilnya pasti lebih lancar.”

Berbeda dengan hambatan yang dialami oleh Bapak Sutarno, Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan Pak Djumani, pada tanggal 24 Februari 2012 menyebutkan:

“kurangnya ya karena dari Faskel kurang kordinasi dengan masyarakat terus barang-barang yang digunakan untuk sumur gitu banyak masyarakat yang tertipu karena tidak paham tentang barang yang dipakai. Trus waktu pemasangan dia tidak mengundang masyarakat maupun dari mewakili masyarakat, jadi ada komplain dari

pemkot kita gak tau kar'na kita terus terang buta masalah itu. Jadi waktu itu barang yang dipakai ada yang tidak sesuai standart yang kita harapkan.”

Demikian pula informasi yang diberikan oleh Ketua RT 4 Kelurahan

Bulusan Pak Djumani tanggal 24 Februari 2012:

“istilahnya ada usulan dari masyarakat sebetulnya gini seharusnya gitu, ya masyarakat kan masalah buta sama sekali taunya airnya lancar bersih ya gak ada masalah tapi kalau airnya macet baru masalah. PAMSIMAS itu tujuannya gimana kan gak tau setelah ada sosialisasi trus akhirnya pas pelaksanaan itu kita jelaskan jadi kan saya sebagai satlak harus mewakili masyarakat dan memonitoring sama-sama dari Faskel. Jadi kalau ada pekerja yang kurang pas qt wajib tegur. Jadi ya jarang masalahnya karena sebelum melangkah kita rembuk dulu.”

Melalui pengumpulan data diatas terlihat bahwa walaupun mayoritas partisipan mengatakan tidak pernah ada permasalahan, namun informasi yang tak kalah penting adalah bahwa permasalahan selama pelaksanaan program sering terjadi baik antara pengelola dengan pelaksana program, kurangnya koordinasi, dan masalah teknis.

3.3.1.2.7. Ketepatan Lokasi Pembangunan Sarana

Adanya penelitian terlebih dahulu terhadap kondisi topografi di daerah penerima manfaat PAMSIMAS merupakan hal yang sangat penting, karena lokasi pembangunan menentukan sejauh mana sumber daya yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kondisi topografi dan jumlah debit air yang mampu dihasilkan suatu tempat menjadi faktor penentu lokasi pembangunan sarana. Berikut pendapat masyarakat mengenai tepat tidaknya penempatan sarana air PAMSIMAS:

Tabel 3.14
Ketepatan Lokasi Pembangunan Sarana
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Tepat	13	12
2	Tepat	67	62,1
3	Cukup Tepat	17	15,7
4	Tidak Tepat	11	10,2
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 10

Tabel 3.14 menunjukkan ketepatan lokasi pembangunan sarana dengan partisipan paling banyak memilih kategori **tepat** sebanyak 67 partisipan atau 62,1% dan 13 partisipan atau 12% mengatakan sangat tepat dengan. Sebanyak 17 partisipan atau 15,7% mengatakan cukup tepat dan 11 partisipan atau 10,2% memilih tidak tepat. lokasi pembangunan sarana yang mayoritas dikatakan tepat oleh partisipan dengan alasan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sutarno sebagai ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“lokasi tower airnya tepat ya karena tanah tempat terbangunnya sarana tersebut adalah tanah wakaf, dan pembangunannya pun dengan ketinggian yang baik sehingga memungkinkan air mengalir lebih deras, selain itu memang sudah dipilih dengan teknik tertentu area yang memiliki air artesis yang baik.”

Lokasi pembangunan sarana sangat penting sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat program mendapatkan pelayanan yang baik, melalui pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan lokasi

pembangunan sarana tepat dan tidak menimbulkan konflik karena tanah yang digunakan adalah tanah wakaf.

3.3.1.3. Pelaksanaan Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3.3.1.3.1. Banyak Promosi PHBS

Masyarakat yang dibantu oleh tim fasilitator mendiskusikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil dari diskusi tersebut menjadi materi pelatihan yang dilakukan di PUSKESMAS masing-masing kelurahan. Berikut ini merupakan frekuensi pengakuan dari partisipan mengenai banyaknya promosi PHBS yang diikuti:

Tabel 3.15
Banyak Promosi PHBS
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	≥ 5 kali	21	19,4
2	3-4 kali	11	10,2
3	1-2 Kali	42	38,9
4	Tidak ada	34	31,5
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 11

Melalui tabel 3.15 dapat dilihat bahwa banyaknya promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang diterima partisipan paling banyak hanya **1-2 kali** sebesar 42 partisipan atau 38,9%, 34 partisipan atau 31,5% mengatakan tidak pernah mengikuti promosi PHBS. Selanjutnya sebanyak 21 partisipan atau 19,4% mengatakan mengikuti promosi PHBS sebanyak ≥ 5

kali di kelurahan dan di sekolah, demikian kategori 3-4 kali dipilih 11 partisipan atau 10,2%.

Kategori satu sampai dua kali promosi PHBS paling banyak dipilih karena partisipan hanya merasa perlu tau saja dan memang diajak oleh PKK di kelurahan masing-masing (biasanya diikuti oleh perempuan). Demikian yang disampaikan oleh Pak Suswandito (Tukang Bangunan, 32 Tahun) pada tanggal 24 Februari 2012 menyatakan:

“kalau PHBS saya kurang tau ya mbak, seperti saya katakan tadi kalau saya kebanyakan bekerja diluar rumah, kalau soal kebersihan ya ibu yang tau. Mungkin pernah ikut 1-2 kali tapi saya kurang tau, yang tau ya ibu tapi kebetulan sedang keluar ik mbak.”

Sama halnya dengan yang dialami oleh Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan bahwa:

“sebenarnya pelatihannya kurang saya ikuti ya, tapi memang ada sosialisasinya pas pertemuan RT. Kalau PHBS dari kelurahan paling jentik-jentik, kalau yang di Puskesmas saya tidak ikuti mbak tapi memang pernah ada saya dengar mbak.”

Akan tetapi berbeda dengan informasi yang diberikan oleh salah satu BPS Kelurahan Mangunharjo, Pak Ismail, pada tanggal 02 Maret 2012 menyatakan:

“ada ibu-ibu dalam rangka ingin tahu seperti apa hidup sehat itu, kurang lebih diadakan 3 kali, pelatihannya cukup memuaskan karena dibimbing oleh petugas PAMSIMAS ini. Selain di kelurahan dan puskesmas PHBS juga dilakukan disekolahan di Sekolah Dasar, waktu itu penyuluhannya disambut baik mbak. ”

Demikian melalui pernyataan diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti promosi PHBS masih kurang, bahkan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut,

walaupun melalui hasil wawancara terbukti bahwa adanya promosi yang dilakukan 3 kali.

3.3.1.3.2. Kesesuaian Pelatihan PHBS dengan Kebutuhan

Pelatihan PHBS merupakan salah satu komponen kegiatan PAMSIMAS yang sangat penting karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup sehat. Pada umumnya materi dan banyaknya promosi PHBS yang dilakukan sudah melalui proses identifikasi terlebih dahulu. Berikut merupakan pendapat partisipan terhadap sesuai tidaknya pelatihan PHBS dengan kebutuhan:

Tabel 3.16
Kesesuaian Pelatihan PHBS dengan Kebutuhan
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	5	4,6
2	Sesuai	59	54,6
3	Cukup Sesuai	33	30,6
4	Tidak Sesuai	11	10,2
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 12

Melalui tabel 3.16 dapat dilihat bahwa kesesuaian pelatihan PHBS dengan kebutuhan mayoritas partisipan memilih **sesuai** yakni sebanyak 59 partisipan atau 54,6% dari total keseluruhan. Hal ini dikarenakan pelatihan dilakukan berbasis masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat

mengungkapkan keluhan kesehatan selama penggunaan air dan sanitasi, terlebih untuk anak-anak disekolahkan untuk rajin mencuci tangan sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena materi yang diberikan cukup dipahami dan isinya mengenai penanggulangan diare dan seputar penggunaan air bersih. Bahkan 5 partisipan atau 4,6% memilih sangat sesuai. Demikian disampaikan oleh Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan, Pak Djumani, tanggal 24 Februari 2012:

“materi yang diampaikan cukup sesuai, masyarakat sini cukup baiklah mbak perilaku sehatnya gak ada masalah”

Selanjutnya sebanyak 33 partisipan atau 30,6% menyatakan cukup sesuai, selebihnya sebanyak 11 orang atau 30,6% menyatakan partisipan dan seluruh anggota keluarga tidak pernah mengikuti penyuluhan kesehatan yang ada jadi lebih memilih kategori tidak sesuai.

3.3.1.3.3. Tingkat Mengalami Gangguan Diare Setelah Program

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air yang tersedia di masyarakat, program PAMSIMAS juga secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi jumlah penderita diare melalui air yang layak minum dan pelatihan perilaku hidup bersih. Berikut merupakan data yang menggambarkan tingkat gangguan diare setelah adanya program di Kecamatan Tembalang:

Tabel 3.17
Tingkat Mengalami Gangguan Diare Setelah Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	≥ 5 kali	0	0
2	3-4 kali	0	0
3	1-2 kali	5	4,6
4	Tidak pernah	103	95,4
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 13

Tabel 3.17 menunjukkan tingkat mengalami gangguan diare setelah program dengan partisipan paling banyak memilih kategori **tidak pernah** sebanyak 103 orang atau 95,4% karena kebanyakan partisipan tidak menggunakan air bersih tersebut sebagai sumber air minum, selain itu kebanyakan masyarakat melakukan PHBS dan sanitasi yang memadai. Selebihnya 4,6% atau 5 partisipan merasa pernah mengalami gangguan diare setelah program dan merasa wajar saja tergantung fisik dan keseharian seseorang. Tidak ada yang memilih kategori ≥ 5 kali dan 3-4 kali.

3.3.2. Fenomena Pengelolaan (Menerus dan Berkala)

Pada tahap ini berfungsinya Badan Pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting perannya untuk keberlanjutan program sarana air minum, karena sarana tersebut merupakan sarana umum milik publik, dimana semua orang yang mendapatkan program tanpa terkecuali berhak menggunakannya.

3.3.2.1. Badan Pengelola

3.3.2.1.1. Kemampuan Lembaga dalam Mengelola Sarana

Pengelolaan sarana ditingkat masyarakat bukanlah hal yang mudah, hal ini menuntut keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kondisi sarana yang sudah terbangun. Apabila lembaga yang mengelolanya kurang berkompeten maka sarana yang sudah terbangun baik dan berkualitas belum tentu dapat bertahan dalam waktu panjang. Berikut ini hasil pengumpulan data mengenai tingkat kemampuan lembaga dalam mengelola sarana:

Tabel 3.18
Kemampuan Lembaga dalam Mengelola Sarana
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat mampu	3	2,8
2	Mampu	85	78,7
3	Kurang Mampu	18	16,7
4	Tidak mampu	2	1,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 14

Tabel 3.14 menunjukkan Kemampuan lembaga dalam mengelola sarana dengan partisipan paling banyak memilih kategori **mampu** sebanyak 85 partisipan atau 78,7%, sebanyak 3 partisipan atau 2,8% memilih sangat mampu, selanjutnya sebanyak 18 orang atau 16,7% mengatakan kurang mampu, dan terdapat 2 partisipan atau 1,8% memilih kategori tidak mampu.

Kategori mampu mayoritas dipilih oleh partisipan dengan alasan setiap kali ada permasalahan misalnya airnya tidak mengalir atau pompa rusak langsung ditangani oleh pengelola dan memang berusaha melakukan pelayanan yang terbaik apalagi air tersebut memang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan partisipan, Bapak Sutarno sebagai ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“disini kan baru diganti pengelolanya, dulunya yang mengurus masyarakat dekat sini tapi sudah berapa bulan terakhir diserahkan pengelolaannya ke RW alasannya gak sanggup mbak banyak keluhan warga sering ditanyain kenapa airnya gak ngalir, apalagi pas kemarau dulu. Tapi sekarang udah gak lagi mbak, ya lebih bereslah setelah dikelola RW, mengingatkan kepada masyarakat tata cara dan hambatannya.”

Namun yang tak kalah pentingnya adalah pernyataan dari partisipan yang memilih kategori cukup mampu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ngatmin, ketua RW 1, Kelurahan Rowosari, pada tanggal 04 Maret 2012 bahwa:

“BPS dulu tahun 2009 dan 2010 kinerjanya bagus, sering bersihin tempat penampungan/bak karena memang sampai sekarang masyarakat masih mengeluh airnya agak keruh. Tapi untuk kepengurusan sekarang kurang sering melakukan pengurusan.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas dapat diketahui bahwa adanya beberapa partisipan yang merasakan ketidakpuasan terhadap kemampuan BPS dalam mengelola sarana, namun sebahagian besar mengatakan bahwa BPS sudah mampu mengelola sarana yang disediakan dengan baik.

3.3.2.1.2. Kemampuan Lembaga dalam Mengelola Anggaran

Lembaga yang telah ditunjuk masyarakat sebagai pengelola program setelah tahap pembangunan konstruksi sarana memiliki tanggungjawab untuk mengelola iuran yang dibayarkan masyarakat tiap bulannya sesuai dengan aturan yang ada. Berikut pendapat partisipan mengenai kemampuan lembaga dalam mengelola anggaran:

Tabel 3.19
Kemampuan Lembaga dalam Mengelola Anggaran
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Mampu	3	2,8
2	Mampu	96	88,9
3	Kurang mampu	9	8,3
4	Tidak Mampu	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 15

Melalui tabel 3.19 dapat dilihat bahwa kemampuan lembaga dalam mengelola anggaran, mayoritas partisipan memilih **mampu** yakni sebanyak 96 partisipan atau 88,9% dari total keseluruhan. Sebanyak 2,8 % atau 3 partisipan menganggap BPS sangat mampu dalam mengelola anggaran, 9 partisipan atau 8,3% memilih kategori kurang mampu, dan tidak ada yang memilih kategori tidak mampu. Partisipan memilih kategori mampu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“BPS nya sudah diganti ya kerenanya waktu musim kemarau yang lalu banyak yang protes, tempatku kok gak ngalir. Ya udah BPS nya bingung akhirnya pengurusannya diambil alih Pak RW. Ini kemarau kemaren 2 bulanan BPS nya tidak jalan nagih iuran, tapi airnya tetap ngalir sedikit-sedikit disini jatahnya malam, ditempat lain jatahnya pagi. Tapi ya sebelumnya tiap bulan nagih kerumah-rumah mbak, dan sejauh ini gak ada ribut-ribut soal pengelolaannya.”

Melalui hasil wawancara tersebut diatas dapat terlihat bahwa BPS diyakini oleh mayoritas partisipan mampu mengelola anggaran dan melalui pernyataan diatas dapat terlihat bahwa tidak adanya konflik dalam pengelolaan dana oleh BPS.

3.3.2.1.3. Mutu pelayanan Pengelola Sarana

Selain fungsi mengelola sarana dan anggaran, badan pengelola juga bertugas untuk menerima pendapat dan keluhan dari masyarakat. BPS berfungsi untuk mengorganisir masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana sehingga air yang mengalir selalu lancar dan terbagi secara adil-merata. Hal tersebut dijadikan ukuran dalam menilai baik tidaknya kualitas pelayanan yang diberikan BPS seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.20

**Mutu Pelayanan Pengelola Sarana
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012**

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	3,7
2	Baik	59	54,6
3	Cukup Baik	39	36,1
4	Tidak Baik	6	5,6
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 16

Melalui tabel 3.20 dapat dilihat bahwa mutu pelayanan pengelola sarana mayoritas partisipan memilih **baik** yakni sebanyak 54,6% atau 59 partisipan dari total keseluruhan, sebanyak 4 partisipan atau 3,7% memilih kategori sangat baik, sebanyak 39 partisipan atau 36,1% memilih kategori cukup baik, dan selebihnya 6 partisipan atau 5,6% memilih kategori tidak baik. Kategori baik mayoritas dipilih oleh partisipan sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“sejauh ini pelayanan yang diberikan baik mbak, kalau ada gangguan di sumur bor/tandon itu di air pusat, langsung memanggil orang yang ahli setau saya juga membersihkan tandon air pun dilakukan untuk menjaga kebersihan air.”

Demikian pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sutarno sebagai ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“badan pengelola itu ya cukup penting ya mba istilahnya ya mengelola sarana yang sudah dibangun biar tahan gitu. Jadi BPSnya juga berasal dari masyarakat sini dipilih oleh masyarakat juga di rapat kelurahan, jadi sudah dianggap paling paham lah mbak.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas terlihat bahwa BPS melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga partisipan merasa masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik juga dari BPS, hal ini didukung oleh pendapat dan pilihan mayoritas partisipan terhadap kategori diatas.

3.3.2.1.4. Tingkat Transparansi Tentang Sarana dan Keuangan

Keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dalam kegiatan yang menyangkut keterlibatan orang banyak. Pertanggungjawaban BPS atas biaya

pengelolaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak ada curiga dan membawa konflik kedepannya. Demikian berikut ini pendapat partisipan mengenai tranparansi kondisi sarana dan keuangan:

Tabel 3.21
Tingkat Transparansi Tentang Sarana dan Keuangan
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Transparan	7	6,5
2	Transparan	52	48,1
3	Cukup Transparan	30	27,8
4	Tidak Transparan	19	17,6
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 17

Tabel 3.21 menunjukkan tingkat transparansi tentang sarana dan keuangan dengan partisipan paling banyak memilih kategori **transparan** sebanyak 52 partisipan atau 48,1%, 7 partisipan atau 6,5% memilih kategori sangat transparan, selanjutnya sebanyak 30 partisipan atau 27,8% memilih kategori cukup transparan, dan sebanyak 19 partisipan atau 17,6% memilih kategori tidak transparan. Mayoritas memilih kategori transparan dengan alasan bahwa informasi yang diberikan tentang keadaan sarana dan keuangan lewat kumpulan RT dan diberitahukan kepada partisipan setiap bulannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“Setau saya untuk informasi keuangan selalu diumumkan saat pertemuan bulanan kumpulan RT, jadi ada laporan tertulisnya. Kalau

persoalan jujur tidak jujurnya kan kita kurang tau ya mbak, tapi kalau buat pertanggungjawabannya ada tiap bulan.”

Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BPS berusaha terbuka tentang keuangan dengan melaporkannya kepada masyarakat tiap bulannya sehingga ada bentuk pertanggungjawaban dan masyarakat pun mendapat informasi yang tepat dari sumber yang dipercaya.

3.3.2.1.5. Manfaat dengan Adanya Badan Pengelola

Pelayanan yang baik dari BPS mendorong timbulnya persepsi positif dari masyarakat yang terlihat dari persepsi masyarakat mengenai tingkat manfaat yang diperoleh setelah adanya BPS berikut ini:

Tabel 3.22
Manfaat dengan Adanya Badan Pengelola
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Bermanfaat	27	25
2	Bermanfaat	68	63
3	Cukup Bermanfaat	13	12
4	Tidak Bermanfaat	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 18

Tabel 3.22 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan kategori **bermanfaat** dengan adanya badan pengelola, yakni dengan 68 partisipan atau 63%, 27 partisipan atau 25% dari total keseluruhan memilih kategori sangat bermanfaat, selanjutnya 13 partisipan atau 12% memilih kategori cukup bermanfaat, sementara itu tidak ada partisipan yang memilih kategori tidak

bermanfaat. Adanya manfaat yang diperoleh oleh partisipan dengan adanya badan pengelola terlihat dengan pendapat yang dikemukakan oleh ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“disini kan baru diganti pengelolanya, dulunya yang ngurus masyarakat dekat sini tapi sudah berapa bulan terakhir diserahkan pengelolaannya ke RW alasannya gak sanggup mbak banyak keluhan warga sering ditanyain kenapa airnya gak ngalir, apalagi pas kemarau dulu. Tapi sekarang udah gak lagi mbak, ya lebih bereslah setelah dikelola RW, mengingatkan kepada masyarakat tata cara dan hambatannya.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas terlihat bahwa partisipan memang membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pengarahan dan membantu menyelesaikan permasalahan air yang ada, dimana apabila tak ada badan pengelola tidak bisa mendapatkan pelayanan yang tepat.

3.3.2.2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana

3.3.2.2.1. Keterampilan Masyarakat dalam Mengelola Sarana

Sarana yang tersedia di setiap rumah warga yang mendapatkan program berupa perpipaan, kran air, meteran, dan selang sambungan merupakan sarana yang harus bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat semampunya sesuai dengan pengetahuan yang telah diberikan saat sosialisasi. Namun tidak seluruhnya masyarakat mampu memahami cara mengelola sarana yang baik, demikian terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Keterampilan masyarakat dalam Mengelola Sarana
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Terampil	0	0
2	Terampil	58	53,7
3	Cukup Terampil	34	31,5
4	Tidak Terampil	16	14,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 19

Tabel 3.23 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih keterampilan masyarakat dalam mengelola sarana dalam kategori **terampil** yakni dengan 58 partisipan atau 53,7%, selanjutnya sebanyak 34 partisipan atau 31,5% memilih kategori cukup terampil, kategori tidak terampil sebanyak 16 partisipan atau 14,8%, dan tidak ada partisipan yang memilih kategori sangat terampil. Sebagian besar memilih kategori terampil dalam mengelola sarana, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan, Pak Djumani, tanggal 24 Februari 2012:

“Kalau sarana yang ada di masyarakat itu hanya berupa saluran pipa dan selang sambungan air saja, jadi kalau ada kerusakan atau ingin menambah panjang selang ya biasanya ngegaji orang gitu mbak. Tapi memang waktu sosialisasi kita ada penyampaian materi bagaimana caranya memperbaiki kran atau selang yang bocor atau longgar gitu mbak, yo istilahnya sedikit-sedikit mampu memelihara dan menjaga sarana air sendiri.”

Sesuai dengan data diatas bahwa mayoritas partisipan merasa mampu untuk mengelola sarana dimana selama sosialisasi mendapatkan pengarahan untuk memperbaiki sarana pipa sewaktu sosialisasi masyarakat mendapatkan

pengarahan untuk memperbaiki sarana pipa saluran yang ada dimasing-masing rumah bila mengalami kerusakan, sehingga partisipan memiliki bekal yang memadai.

3.3.2.2.2. Ketahanan Sarana yang Dibangun

Pengadaan barang dan jasa yang berkualitas saat pembangunan berdampak pada ketahanan sarana yang dibangun, masyarakat berpendapat bahwa sarana yang terbangun sejak tahun 2008 dan 2009 ini memiliki ketahanan:

Tabel 3.24
Ketahanan Sarana yang Dibangun
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Tahan/Awet	41	38
2	Awet	47	43,5
3	Cukup Awet	20	18,5
4	Tidak Awet	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 20

Tabel 3.24 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih sarana yang dibangun dalam kategori **awet** yakni dengan 47 partisipan atau 43,5%, kategori sangat awet/tahan dipilih sebanyak 41 partisipan atau 38%, selanjutnya 19 partisipan atau 18,5% memilih kategori cukup awet, sementara itu tidak ada partisipan yang memilih kategori tidak awet. Menanggapi pendapat partisipan yang mayoritas memilih kategori awet, Bapak Ngatmin, Ketua RW 1 Kelurahan Rowosari tanggal 04 maret 2012 mengatakan bahwa:

“di Rowosari baru 3 tahun berjalan sarananya masih awet-awet semua tidak pernah ada yang rusak. Soalnya dulu waktu beli semen di tokonya sudah dijamin bisa tahan sampai 15 tahun mbak. Selama ini belum pernah ada kerusakan. Kalau BPS sendiri mengelola sarana ya dengan membersihkan bak penampungan airnya. Karena sering keruh jadi masyarakatnya mengeluh, kita ya siap sedia saja membersihkan.”

Melalui pengumpulan data diatas, dapat diketahui bahwa sejauh ini tidak ada kerusakan berat dan memang jangka waktu setelah pembangunan masih tergolong baru yakni 2 tahun jadi belum tau pasti dalam jangka waktu panjang masih tetap awet selain itu sarana yang dibangun dibuat dengan bahan yang berkualitas dan dikerjakan oleh orang yang ahli.

3.3.2.2.3. Kualitas Debit Air

Kualitas debit air merupakan hal yang sangat penting dan menentukan titik kepuasan masyarakat akan sarana yang ada. Penerima manfaat program berharap debit air yang dialirkan mampu memenuhi konsumsi air bersih masyarakat serta tidak dipengaruhi oleh cuaca. Berikut ini merupakan pendapat partisipan mengenai kualitas debit air selama ini:

Tabel 3.25
Kualitas Debit Air
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Lancar (deras)	6	5,6
2	Lancar	60	55,6
3	Cukup Lancar	29	36,8
4	Tdak Lancar	13	12
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 21

Melalui tabel 3.25 dapat dilihat bahwa kualitas debit air dipilih oleh partisipan dalam kategori **lancar** dengan frekuensi 60 atau 55,6% dari total keseluruhan, sangat lancar dipilih 6 partisipan atau 5,6%, sebanyak 29 partisipan atau 36,8% memilih cukup lancar, dan sebanyak 13 partisipan atau 12% memilih tidak lancar. Pemilihan kategori tersebut sangat dipengaruhi oleh morfologi daerah yang mendapatkan program seperti yang diungkapkan oleh Pak Ismail, BPS Kelurahan Mangunharjo, tanggal 02 Maret 2012:

“untuk RT 1-5 debit airnya lancar karena daerahnya lebih rendah dari tandon air yang dibangun, tapi untuk RT 6-8 airnya kurang lancar karena daerahnya lebih tinggi. Jadi ya gitu kita sering dapat keluhan dari masyarakat kok airnya gak ngalir, apalagi daerah yang jauh dari tandon selalu tanya pak kok airnya kecil. Tapi ya kita belum dapat pemecahannya mbak.”

Kesulitan mendapatkan air di daerah yang lebih tinggi juga sama-sama dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Tembalang, Bulusan, dan Rowosari. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari nara sumber yang sama dengan pernyataan Pak Ismail, namun di kelurahan Bulusan ada solusi yang ditemukan, demikian pernyataan Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan, Pak Djumani, tanggal 24 Februari 2012:

“Awalnya masyarakat yang tinggalnya di daerah lebih tinggi ngeluh kok airnya kecil, malah banyak yang mau mutus. Akhirnya kita rembuk carikan solusi untuk menggilir pembagian air, jadi daerah timur kebagiannya pagi daerah sini kebagian sore.”

Melalui hasil pengumpulan data diatas terlihat bahwa walaupun mayoritas partisipan memilih kategori kualitas debit air lancar, namun yang tak kalah penting adalah informasi mengenai beberapa partisipan yang merasa

masih kurang mendapatkan debit air yang sesuai dikarenakan daerah yang jauh dan letaknya lebih tinggi daripada posisi tower air.

3.3.2.2.4. Kesulitan Mengelola dan Memelihara Sarana

Keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan sarana merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat, dengan demikian dalam mengelola dan memelihara sarana masyarakat berpendapat bahwa:

Tabel 3.26

**Kesulitan Mengelola dan Memelihara Sarana
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012**

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Sulit	0	0
2	Sulit	9	8,3
3	Cukup Sulit	17	15,7
4	Tidak Sulit	82	76
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 22

Melalui tabel 3.26 dapat dilihat bahwa partisipan mayoritas memilih kategori **tidak sulit** untuk mengelola dan memelihara sarana dengan frekuensi 82 partisipan atau 76% dari total keseluruhan, sebanyak 17 partisipan atau 15,7% memilih kategori cukup sulit, 9 partisipan atau 8,3% memilih sulit, dan tidak ada partisipan yang memilih kategori sangat sulit. Dalam mengelola dan memelihara sarana kebanyakan partisipan merasakan tidak ada kesulitan, hal ini dengan alasan sebahagian besar partisipan merasa

mengelola sarana berupa saluran pipa dan selang yang ada di warga tidak sulit karena sarana yang sederhana dan sangat awet, diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan, Pak Djumani, tanggal 24 Februari 2012:

“untuk pemeliharaan sarana kita kan sudah punya kas sendiri dari iuran tiap bulan yang diberikan konsumen untuk bayar listrik, bayar gaji, terlebih kalau ada kerusakan dan pembersihan tampungan air, itupun kalau rusak kan jarang dan langsung kita panggil orang yang ahli, sarana yang disini selang airnya sederhana saja tinggal nyalakan air sudah mengalir lancar, jadi sejauh ini tidak sulit mbak.”

Berbeda dengan hal tersebut beberapa partisipan menyebutkan mengalami kesulitan dalam mengelola dan memelihara sarana yang tersedia seperti yang diungkapkan oleh BPS pertama Kelurahan Tembalang, Bapak Boyadi, pada tanggal 19 Februari 2012 yakni:

“Waktu musim kemarau air memang tergolong sulit, sumur yang biasa dipakai warga juga kering. Pada akhirnya dilakukanlah sistem pembagian air, dan itu tergolong sulit karena masyarakat masih merasa kurang puas karena nyala airnya kecil. Ditambah lagi kalau ada kebocoran pipa itu jadi menambah beban pengeluaran.”

Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam mengelola dan memelihara sarana yang ada di masing-masing rumah partisipan yakni berupa pipa, kran, dan selang air, tidaklah sulit. Namun untuk pemeliharaan mesin dan tandon air dibutuhkan perhatian yang lebih karena lebih sulit mengingat beban kerjanya lebih besar, terlebih pada saat musim kemarau.

3.3.2.2.5. Kesesuaian Pengelolaan dengan Standar Ditetapkan

Konstruksi air yang sudah selesai dibangun tidak sembarangan untuk dikelola karena sudah ditentukan standart operasionalnya. BPS sebagai

lembaga yang dipercaya memiliki keterampilan khusus yang sebelumnya sudah mendapat pendampingan dari tim fasilitator, sehingga dimungkinkan adanya pengelolaan yang sesuai dengan aturan teknis pengelolaan. Berikut penilaian masyarakat mengenai kesesuaian pengelolaan dengan standar yang ditetapkan:

Tabel 3.27
Kesesuaian Pengelolaan dengan Standar Ditetapkan
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	0	0
2	Sesuai	73	67,6
3	Cukup Sesuai	29	26,8
4	Tidak Sesuai	6	5,6
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 23

Melalui tabel 3.27 dapat dilihat bahwa kesesuaian pengelolaan dengan standar yang ditetapkan mayoritas dipilih 73 partisipan atau 67,6% dari total keseluruhan dengan kategori **sesuai**, sebanyak 29 partisipan atau 26,8% memilih cukup sesuai, selanjutnya 6 partisipan atau 5,6% memilih kategori tidak sesuai, sementara itu tidak ada partisipan yang memilih kategori sangat sesuai. Kesesuaian pengelolaan dengan standar yang ditetapkan ditanggapi oleh Pak Ismail, BPS Kelurahan Mangunharjo, tanggal 02 Maret 2012:

“sebelum memulai pelaksanaan program sudah ada pengarahan dari pemerintah ya mbak, jadi pastinya yang kita kelola sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan memang pengelolaan sarana nya tidak terlalu sulit, pengeluaran selama pengelolaan tidak melebihi pendapatan yang diperoleh.”

Melalui pengumpulan data tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BPS dan masyarakat sudah sesuai dengan standar yang sebelumnya telah ditentukan, hal ini dimungkinkan karena sarana yang dibangun adalah milik masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat.

3.3.2.2.6. Kelancaran Memberi Iuran Pengelolaan dan Pemeliharaan

Untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun maka dibutuhkan dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk iuran, dimana iuran air seharusnya dihitung berdasarkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana, serta rencana pengembangan sarana di masa datang. Berikut merupakan persepsi masyarakat mengenai kelancaran dalam membayar iuran pengelolaan dan pemeliharaan:

Tabel 3.28
Kelancaran Memberi Iuran Pengelolaan dan Pemeliharaan
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Selalu Membayar	100	92,6
2	Sering Membayar	8	7,2
3	Jarang Membayar	0	0
4	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 24

Tabel 3.28 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih kelancaran memberi iuran pengelolaan dan pemeliharaan dalam kategori **tidak pernah** yakni dengan 100 partisipan atau 92,6 %. Hal ini menjadi

pilihan mayoritas dengan alasan biaya iuran cukup murah dan tidak memberatkan partisipan, selain itu partisipan merasa adanya keseganan terhadap BPS apabila menunggak pembayaran, apalagi iuran tersebut digunakan untuk membayar biaya operasional. Sebanyak 6 partisipan atau 5,6% memilih sering membayar walaupun pernah beberapa kali membayar dan biaya pembuatan awal sarana termasuk lama melunasinya. Sementara itu tidak ada partisipan yang memilih jarang dan tidak pernah membayar.

3.3.2.3. Kegiatan Kesinambungan

3.3.2.3.1. Kemudahan Mendapatkan Air

Salah satu tujuan dari program PAMSIMAS adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses air bersih yang layak konsumsi. Demikian dibawah ini merupakan pendapat dari masyarakat Kecamatan Tembalang atas tingkat kemudahan dalam memperoleh air bersih setelah adanya program:

Tabel 3.29
Kemudahan Mendapatkan Air
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	25	23,2
2	Mudah	62	57,4
3	Cukup Mudah	19	17,6
4	Sulit	2	1,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 25

Tabel 3.29 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih kemudahan mendapatkan air dalam kategori **mudah** yakni dengan frekuensi 62 partisipan atau 57,4 %, 25 partisipan atau 23,2% memilih kategori sangat mudah mendapatkan air bersih, sebanyak 19 partisipan atau 17,6% memilih kategori cukup mudah, selanjutnya hanya 2 partisipan atau 1,8%. Kemudahan dalam mendapatkan air dialami oleh mayoritas partisipan setelah menggunakan air, demikian diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan Pak Djumani (24 Februari 2012) menyatakan:

“Saya merasa sangat dimudahkan sekali ya mbak dan lebih murah juga airnya lancar dan sejauh ini tidak mengalami gangguan kesehatan. Kalau keuntungan ekonomi dari air ini rasa gak ada efeknya bagi penghasilan kita kar’na itu kita sangat mengutamakan air sekali, dan itu juga masyarakat dilingkungan lain jadi gak ada yang ngeluh keberatan kar’na memang harganya murah dan memang itu untuk masyarakat untuk kita semua, jadi kita tarik sesuai kebutuhan masing-masing.”

Menyambung pernyataan tersebut, Pak Djumani juga menambahkan walaupun beralih penggunaan air dari sumur dalam menjadi PAMSIMAS tidak ada kendala dalam mendapatkan air bersih, seperti pernyataan berikut:

“saya tidak pake Sanyo, disini langsung dari pusat saya naikkan ke tower-tandon yang diatas, langsung naik. Awalnya pake sumur gali, tapi setelah ada PAMSIMAS saya ya pake ini. Alasannya kita istilahnya tidak boros, kalau sama air ini kan tiap harinya Cuma mengeluarkan uang Rp 1000an per meter, tapi kalau pake Sanyo kan menambah beban listrik. Jadi gitu mengurangi biaya listrik lebih murah dari pada pake Sanyo, airnya juga bagus-jernih.”

Demikian melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa adanya kemudahan yang dirasakan oleh partisipan dalam memperoleh air bersih setelah adanya program PAMSIMAS.

3.3.2.3.2. Pengaruh Cuaca Terhadap Kualitas Ketahanan Air

Tembalang merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang mengalami kekeringan dan kekurangan air saat musim kemarau. Oleh karenanya, PAMSIMAS sebagai program jangka panjang diharapkan mampu menyediakan debit air yang sangat banyak mengingat kedalamannya yang mencapai 100 meter. Melalui pengumpulan data yang dilakukan penulis ditemukan persepsi yang berbeda dari masyarakat mengenai pengaruh cuaca terhadap ketahanan air, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Pengaruh Cuaca Terhadap Kualitas Ketahanan Air
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Berpengaruh	7	6,5
2	Berpengaruh	28	25,9
3	Cukup Berpengaruh	10	9,3
4	Tidak Berpengaruh	63	58,3
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 26

Tabel 3.30 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan menyatakan pengaruh cuaca terhadap kualitas ketahanan air dalam kategori **tidak berpengaruh** yakni dengan 63 partisipan atau 58,3 %. Hal ini menjadi pilihan mayoritas dengan alasan air tersedia setiap saat pada musim kemarau ataupun musim hujan. Sebanyak 10 partisipan atau 9,3% memilih cukup berpengaruh, 28 partisipan atau 25,9% memilih kategori berpengaruh, sebanyak 7 partisipan atau 6,5% memilih sangat berpengaruh. Mayoritas

partisipan memilih kategori tidak adanya pengaruh kualitas ketahanan air dengan cuaca dimana pendapat ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pernyataan Ketua RT 4 Kelurahan Bulusan, Pak Djumani, tanggal 24 Februari 2012 bahwa:

“Kalau air sendiri kita kalau musim hujan sendiri airnya keruh mba kalau musim kemarau lasat, kering gak ada airnya. Jadi makanya dulu kita semangat pas ada sosialisasi PAMSIMAS, harus diminta saya bilang gitu, kalau gak gitu gak ada. Kalau musim kemarau air PAMSIMAS tetap ngalir, lancar kar’na sudah digilir mbak, kalau dulu tahun sebelumnya belum digilir masih bebas jadi masih ada masyarakat yang merasa kurang lancar apalagi yang rumahnya diatas.....jadi sekarang sudah merasakan lancar kemarau kemaren itu gak ada masalah”

Berbeda dengan hal tersebut bahwa yang tak kalah penting bahwa beberapa partisipan merasa adanya pengaruh antara cuaca dengan ketahanan air seperti berikut yang disampaikan oleh Anis Analisa (Usaha Laundry, 31 tahun) pada 18 Februari 2012:

“Hari-hari musim hujan seperti ini airnya lancar, kalau kemarau kurang karena dialihkan ketempat lain tapi sebenarnya ya lancar. Kemarau airnya yang keluar sedikit tapi yang makai banyak, bagi sini sana. Kalau musim penghujan gini pakainya air sumur, kalau kemarau baru pakai air PAMSIMAS.... Kalau menurut saya airnya memang jelek, kalau dikamar mandi itu ya airnya dikuras terus, makanya saya jarang makai. Kalau tempat sini kan pakai sumur, PAMSIMAS nya hanya buat laundry saja.

Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa beberapa partisipan yang berbeda daerah merasakan bahwa adanya pengaruh antara cuaca dengan ketahanan air dimana saat musim kemarau air mengalir sedikit sementara yang membutuhkan cukup banyak. Namun mayoritas tetap berpendapat

bahwa tidak ada pengaruh cuaca terhadap ketersediaan air PAMSIMAS, dimana air yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan partisipan.

3.3.2.3.3. Kecukupan Air Bersih

Kesinambungan dari program ini terlihat melalui air bersih yang bisa mencukupi segala kebutuhan masyarakat penerima manfaat sehingga memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Tabel berikut ini merupakan persepsi partisipan terhadap tercukupi atau tidaknya air bersih sehari-hari:

Tabel 3.31
Kecukupan Air bersih
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Terpenuhi	20	18,5
2	Terpenuhi	81	75
3	Kurang Terpenuhi	7	6,5
4	Tidak Terpenuhi	0	0
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 27

Tabel 3.31 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan menyatakan kecukupan air bersih dalam kategori **terpenuhi** yakni dengan frekuensi 81 partisipan atau 75%, 20 partisipan atau 18,5% memilih kategori sangat terpenuhi, sementara itu tidak ada partisipan yang merasa tidak berkecukupan air bersih, dan sebanyak 7 partisipan atau 6,5% memilih kategori kurang terpenuhi. Kebanyakan partisipan memilih kategori tercukupinya kebutuhan

air bersih dengan alasan seperti dikemukakan oleh ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012 menyatakan:

“oh kalau saya pake dua mbak PAMSIMAS sama dan sumur gali, ya karna kan awalnya memang sebelum PAMSIMAS saya pakenya sumur gali kalau sekarang gak digunakan ya eman-eman mba apalagi kalau musim hujan gini kan enakya pake sumur gali, air PAMSIMAS-nya paling buat cuci motor atau siram tanaman, musim kemarau baru PAMSIMAS-nya digunakan kar’na air sumurnya udah kering, ya sesuai manfaatnya lah mba.”

Menyambung pernyataan tersebut, bahkan Bapak Djumani merasa kebutuhan akan air bersihnya sangat terpenuhi dan menggunakan air tersebut sebagai sumber air minum, diperkuat dengan pernyataan sebagai berikut:

“kalau air minum saya tetap menggunakan air PAMSIMAS, rasanya biasa-biasa saja, kalau mandi airnya gak lengket, ya segarlah mbak. Aku selalu setiap hari pake itu mbak, disumur saya masih ada baknya gak saya pake, saya cabut, jadi pake PAMSIMAS aja mba.....sama sekali gak ada kendala pake airnya kar’na kita sudah tau jadwal hidupnya jadi mungkin pas giliran kita hidupkan, pake stop kran aja didepan. Jadi jadwalnya sore kita nyalakan langsung naik ke atas.....kesulitannya ya itu tadi didaerah tinggi dulunya agak sulit padahal sudah dimaksimalkan padahal kedalamannya 97 m.”

Melalui pengumpulan data diatas dapat diketahui bahwa adanya kecukupan air bersih yang dirasakan oleh partisipan dimana dengan adanya PAMSIMAS, partisipan mendapat tambahan sumber air bersih selain sumur bor yang biasa digunakan sehingga diharapkan masyarakat yang mendapatkan program tidak kekurangan air bersih walaupun musim kemarau.

3.3.2.3.4. Perubahan PHBS Setelah Program

Pencapaian akses 100% masyarakat terhadap sarana air bersih berdampak pula pada sanitasi yang lebih bersih, aman dan terbebas dari

praktek buang air besar ditempat terbuka serta praktek cuci tangan memakai sabun. Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan adanya perubahan PHBS yang dilakukan oleh masyarakat:

Tabel 3.32
Perubahan PHBS Setelah Program
di Kecamatan Tembalang, 18 Februari 2012 – 06 Maret 2012

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Selalu Dilakukan	40	37
2	Sering Dilakukan	60	55,6
3	Hanya Sese kali	6	5,6
4	Belum Dilakukan	2	1,8
	Jumlah	108	100

Sumber : Diolah dari daftar pertanyaan III No 28

Tabel 3.33 menunjukkan bahwa mayoritas partisipan menyatakan perubahan PHBS setelah program dalam kategori **sering dilakukan** yakni dengan frekuensi 60 partisipan atau 55,6 %, 40 partisipan atau 37% memilih kategori selalu dilakukan, selanjutnya 6 partisipan atau 5,6% memilih kategori hanya sesekali, dan 2 partisipan atau 1,8% memilih kategori belum dilakukan.

Menanggapi perubahan PHBS yang dilakukan setelah program Bapak Ngatmin, Ketua RW 1, tanggal 04 maret 2011 menyatakan bahwa:

“dulunya masih banyak yang nyuci pakaian di kali, tapi sekarang setidaknya sudah bisa nyuci sendiri di rumah dibandingkan harus pakai air sumur. Sangat membantulah mbak.”

Sependapat dengan hal tersebut Pak Ismail, BPS Kelurahan Mangunharjo, tanggal 02 Maret 2011 menyatakan:

“masyarakat disini sering BAB di Kali, sawah, tegalan, setelah PHBS PAMSIMAS masyarakat sudah mulai hidup sehat karena dibantu adanya sarana air yang bersih.”

Ketua RW 7 Kelurahan Tembalang pada tanggal 18 Februari 2012

juga menambahkan:

“kalau disini rata-rata masyarakatnya sudah melakukan hidup bersih dan sehat, karena masing-masing rumah sudah punya jamban sendiri, kamar mandi sendiri. Jadi daya pikir sebenarnya sebelum penyuluhan PAMSIMAS masyarakat sudah melakukan hidup bersih mbak, ya ini ada penyuluhan tinggal mengingatkan kembali.”

Melalui pengumpulan data diatas dapat diketahui bahwa adanya keinginan dari partisipan untuk melakukan perilaku hidup bersih terlebih karena sudah diberikan bantuan penyediaan air dan juga ada penyuluhan di masyarakat.

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data untuk dilakukannya analisis sesuai dengan kebutuhan. Analisis data merupakan bagian amat penting karena melalui analisis data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun pada bab sebelumnya data yang terkumpul sudah disajikan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi dan tabel frekuensi untuk menemukan persepsi masyarakat yang paling sering muncul akan suatu fenomena. Adapun dalam menjawab perumusan masalah yang disajikan oleh penulis, maka dilakukan analisis data yang menghubungkan antara teori dengan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fenomena yang meliputi:

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan
- (2) Pengelolaan Menerus dan Berkala

4.1. Analisis Data Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan program PAMSIMAS, dimana selain didalamnya terdapat kegiatan pembangunan konstruksi sarana terdapat pula kegiatan yang tak kalah penting yaitu pelatihan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan program. Pelatihan yang berbentuk sosialisasi dari pemerintah ini menitikberatkan pada

peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan sarana termasuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelatihan Hidup Bersih dan Sehat dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

4.1.1. Sosialisasi Program di Masyarakat

Bantuan PAMSIMAS diberikan kepada masyarakat setelah terlebih dahulu dilakukan pemilihan lokasi sasaran dan penerima manfaat yang dilakukan oleh organisasi pelaksana seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya air, dan Unit Pengelola Program DPMU (District Project management Unit). Pemilihan lokasi sasaran penerima program disusun dalam daftar panjang (longlist) yang meliputi indeks kemiskinan, indeks non akses air minum, indeks non-akses sanitasi/jamban, indeks kasus diare, dan dalam dua tahun terakhir tidak terdapat program serupa. Kemudian daftar kelurahan tersebut disusun kembali dalam Shortlist sesuai dengan quota yang ditentukan dan kriteria diatas.

Selanjutnya masyarakat yang diorganisir oleh pelaksana program mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar 70%, bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota sebesar 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20%. Substansi dari pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah penghargaan dan pengembangan kesadaran, prakarsa/inisiatif, dan kesadaran tanggungjawab bersama masyarakat dalam memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan layanan air minum dan sanitasi lingkungan serta praktik hidup bersih dan sehat.

Setelah adanya pendekatan dan identifikasi dari pelaksana program, maka dilakukan pelatihan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sosialisasi mengenai tahapan perencanaan pembangunan sarana dilakukan oleh organisasi pelaksana dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan hingga sampai kepada masyarakat dibantu oleh ketua RW dan Ketua RT setempat bersama dengan lembaga masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan bentuk pelatihan sederhana kepada masyarakat dengan diskusi kelompok masyarakat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi, konstruksi sarana air minum itu sendiri, pelatihan mengenai pembukuan dan pengelolaan keuangan program, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk keberhasilan sosialisasi, masyarakat diharapkan mampu mengetahui dan nantinya secara swadaya mampu membangun sarananya.

Sosialisasi merupakan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan program. Melalui hasil pengumpulan data yang dilakukan diperoleh informasi bahwa organisasi pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak tiga sampai lima kali tergantung kepada kondisi kelurahan yang mendapatkan program. Sosialisasi yang diadakan tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat mampu mengetahui gambaran umum dari program,

memiliki pemahaman yang baik akan sarana air yang dibangun sehingga mempunyai rasa memiliki untuk memiliki sarana yang tersedia.

Sosialisasi diadakan di kelurahan masing-masing sehingga mudah dijangkau dan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat menjadi lebih aktif dan informasi yang disampaikan mudah dipahami. Akan tetapi, hal yang sangat disayangkan bahwa sosialisasi yang diadakan sampai lima kali oleh pelaksana program kebanyakan hanya diikuti satu atau dua kali oleh masyarakat (63,9% partisipan). Hal ini menunjukkan adanya apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap program, namun dari segi kuantitas masih belum sesuai dengan banyaknya sosialisasi yang seharusnya masyarakat ikuti. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi menyebabkan mayoritas dari masyarakat tidak mengetahui program secara spesifik.

Walaupun dari segi kuantitas masyarakat hanya sesekali mengikuti sosialisasi, namun dari segi kualitas keseluruhan masyarakat mampu memahami materi yang diberikan. Hal ini diakui oleh masyarakat karena materi sosialisasi disampaikan dengan kalimat atau pernyataan yang mudah dipahami, demikian terlihat dengan data kumulatif dari pengumpulan data yang dilakukan penulis bahwa 62,1 % partisipan mengetahui program secara spesifik. Walaupun demikian masih ada 38% partisipan yang tidak mengetahui program secara spesifik, untuk itu akan lebih baik apabila masyarakat lebih sering ikut serta dalam proses pelatihan sehingga tercipta partisipasi yang sesuai dengan harapan program, terlebih karena program ini

merupakan bagian dari masyarakat yang nantinya masyarakat diharapkan mampu mengelola sendiri.

4.1.2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Konstruksi di Masyarakat

Dalam tahapan sosialisasi masyarakat dalam bentuk pelatihan, masyarakat yang sudah memahami permasalahan dan analisis situasi daerahnya selanjutnya melakukan persiapan pembangunan sarana konstruksi didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat. Proses ini dilakukan dalam pertemuan-pertemuan informal dengan membicarakan kriteria kegiatan PAMSIMAS. Pembangunan sarana konstruksi menggunakan teknologi yang sederhana, tepat guna, dan dapat dikerjakan oleh masyarakat dengan pendampingan fasilitator. Sarana konstruksi berupa sumur gali/bor dangkal yang dilengkapi dengan pompa, sistem sambungan air ke rumah masyarakat berupa kran umum dan dilengkapi meteran. Selain itu, pembangunan sarana konstruksi menggunakan teknologi sederhana agar mudah dan bisa dioperasikan oleh masyarakat, hal ini didukung dengan 63,9% partisipan dalam kategori mengatakan mutu pekerjaan sarana konstruksi termasuk dalam kategori baik.

Pelaksanaan pembangunan sarana konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan membutuhkan persiapan yang matang. Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah terkumpulnya dana yang dibutuhkan, yakni uang tunai sebesar 4% dari total biaya keseluruhan atau

sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- per KK. Kontribusi tersebut dipakai untuk biaya pembangunan sarana dimana besar uang tersebut tidak memberatkan masyarakat karena sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat dan pembayarannya bisa diangsur, pendapat ini didukung oleh pengumpulan data dimana secara kumulatif sebanyak 97,2% masyarakat menyatakan tidak keberatan mengenai biaya yang dibebankan kepada mereka. Seiring dengan pengumpulan dana tersebut dilakukan pelatihan di lokasi pekerjaan bagi LKM dalam hal ini nantinya akan menjadi BPS (Badan Pengelola Sarana) dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Masyarakat bersama-sama dengan tim pekerja teknis dan LKM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi yang sebelumnya sudah disepakati. Pada saat pelaksanaan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan kemajuan pembangunan baik itu pekerjaan sarana konstruksi seperti pengadaan bahan/material, mutu pekerjaan pengelolaan administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Pengawasan juga berkali-kali dilakukan oleh Pemerintah Kota, karena mereka bertanggungjawab melakukan pendampingan dimasyarakat sehingga bisa diambil langkah-langkah bila terjadi penyimpangan.

Program PAMSIMAS secara khusus diberikan kepada masyarakat miskin dan tertinggal, namun pada pelaksanaan di Kecamatan Tembalang program ini diterima oleh semua kalangan masyarakat yang merasa membutuhkan tambahan air bersih, sepanjang secara administratif daerah

tersebut tergabung dalam lokasi program yang disepakati sebelumnya. Lokasi pembangunan sarana tempat terbangunnya tower PAMSIMAS merupakan tanah yang diwakafkan dan biasanya tanah tersebut adalah milik daerah, dengan pemilihan tempat yang cukup tinggi dan memiliki kapasitas air bawah tanah yang besar dan mempertimbangkan hal topografi, letak dan keberadaan sumber air, biaya konsumsi, cara pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pemanfaatan dan sistem pelayanan, dan aspek lingkungan.

Pembangunan infrastruktur air bersih PAMSIMAS disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, namun biasanya berupa pembangunan sumur galian yang kedalamannya rata-rata mencapai 100 meter, sehingga diharapkan dengan kedalaman ini air yang mengalir mampu mencukupi kebutuhan konsumen. Sistem distribusi air dengan sambungan rumah dan kran umum yang biasanya digunakan oleh keluarga, hal ini memungkinkan adanya asas keadilan dan memudahkan perhitungan penggunaan air yang dilengkapi dengan meteran. Selain itu, kualitas pekerjaan sarana konstruksi terlihat dari tower/tandon air dan pipa saluran air yang dialirkan ke masyarakat dalam kondisi baik karena dikerjakan oleh orang-orang berpengalaman dan disertai dengan pengawasan dari masyarakat.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami selama pelaksanaan program, di Kelurahan Bulusan terdapat koordinasi yang kurang antara tim fasilitator dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak paham mengenai barang-barang yang digunakan untuk pembangunan sarana, terlebih pada saat pemasangan tim fasilitator tidak

mengundang masyarakat ataupun pihak yang mewakili masyarakat. Sehingga pada saat ada pengawasan dari Pemerintah Kota, pihak masyarakat dan LSM sama sekali tidak bisa memberikan keterangan mengenai bahan material bangunan yang digunakan.

Berbeda dengan permasalahan diatas, hambatan yang dialami oleh Kelurahan Tembalang pada saat pelaksanaan program adalah material tanah yang bercampur dengan air yang sulit sekali dibuang sehingga air yang mengalir berbau besi dan kurang jernih, hal ini disinyalir disebabkan oleh pengeboran air yang terlalu dalam sehingga bercampur lumpur. Selain itu besar pipa yang digunakan untuk mengalirkan air kerumah-rumah penduduk sama besarnya, hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah lebih tinggi mendapatkan air yang lebih sedikit dibandingkan rumah penduduk yang lebih rendah. Seharusnya pada saat pemasangan diameter pipa sambungan air dibedakan, daerah yang lebih tinggi dengan pipa yang lebih besar sehingga air bisa mengalir rata. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan 35,2% partisipan menyatakan sering terjadi permasalahan selama pelaksanaan program.

Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat memanfaatkan organisasi dan sumberdaya yang telah ditentukan sebelumnya, jadi setiap ada permasalahan seharusnya ada tindak lanjut dari satuan pelaksana ataupun pengelola terkait, sehingga nantinya sarana yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merangsang perpecahan antara masyarakat, pengelola, fasilitator, dan pemerintah. Masyarakat dituntut untuk

berpartisipasi aktif dan pemerintah dituntut untuk memberikan pendampingan serta penyuluhan yang tepat dan benar, sehingga diharapkan melalui rembuk bersama antara masyarakat dan organisasi pelaksana akan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.1.3. Pelaksanaan Pelatihan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang dianjurkan kepada masyarakat untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. PHBS adalah bentuk perwujudan paradigma sehat dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) mendapatkan pelatihan untuk mengubah perilaku hidup tidak bersih dan sehat seperti buang air besar pada jamban yang tidak sehat, membuang kotoran bayi atau balita pada jamban, mencuci tangan dengan sabun setelah buaang air besar, setelah membersihkan kotoran bayi, dan sebelum makan.

Pada awalnya tujuan dari PHBS ini adalah membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencegah sanitasi buruk dan air yang tidak bersih yang mengakibatkan diare, namun pada tahap identifikasi masalah dan analisis situasi yang dilakukan oleh pelaksana program, bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Tembalang terkhusus empat daerah yang dijadikan sampel penelitian sudah memiliki sarana sanitasi yang memadai, dan kebanyakan dari warga tersebut menggunakan air galon atau isi ulang sebagai sumber air minum. Berbeda dengan kelurahan tersebut, sebelum adanya program beberapa masyarakat di Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Mangunharjo

menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian terlebih di Kelurahan Mangunharjo masih ditemukan penduduk yang BAB di kali, sawah, atau tegalan.

Promosi PHBS ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum wanita dan anak-anak usia sekolah. Hal ini mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh konsultan kesehatan yang disediakan oleh organisasi pelaksana dengan menggunakan metode partisipasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Masing-masing kelurahan mendapatkan promosi PHBS dari program PAMSIMAS yang biasa diadakan di PUSKESMAS kelurahan setempat dan juga melibatkan partisipasi anak-anak ditingkat sekolah dasar. Pelaksanaan PHBS diadakan di salah satu Sekolah Dasar di Kelurahan Mangunharjo sebagai bentuk kepedulian organisasi pelaksana terhadap pentingnya pendidikan hidup sehat sejak dini.

Pemicuan perubahan perilaku masyarakat dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang sudah siap terlebih dahulu, tidak harus menunggu kelompok masyarakat siap semua. Setelah kegiatan pemicuan dilakukan monitoring untuk melihat perkembangan pencapaian kondisi bebas dari praktek BAB di sembarang tempat, dimana hal ini juga bisa memberikan rekomendasi apakah pemicuan harus dilakukan kembali. Biasanya promosi kesehatan beberapa kali diadakan dan disambut baik oleh masyarakat, namun terlihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan, bahkan tidak

mengetahui sama sekali adanya promosi PHBS di kelurahan setempat. Hal ini terjadi di Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Bulusan dimana masyarakat sudah memiliki sarana sanitasi yang memadai, selain itu kebanyakan masyarakat merasa sudah melakukan perilaku hidup sehat dari dulu sehingga lebih memilih tidak mengikuti penyuluhan serupa.

Untuk merubah secara total perilaku hidup sehat seseorang merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena berhubungan dengan pola pemikiran masing-masing individu. Seseorang mampu untuk merubah perilaku kesehariannya menjadi lebih sehat apabila ada dorongan kuat dari diri sendiri, penyuluhan yang diadakan oleh PAMSIMAS hanya berupa pemicuan dan penyadaran diri untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Melalui promosi PHBS masyarakat Kelurahan Mangunharjo mulai tersadar untuk tidak melakukan BAB di sembarang tempat umum yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

4.2. Pengelolaan Menerus dan Berkelanjutan

Kegiatan pada tahap pasca program untuk konstruksi adalah pengelolaan dan pemeliharaan sarana, adanya keberlanjutan kesehatan oleh masyarakat, dan akses untuk mendapatkan air bersih yang lebih mudah. Pada tahap ini, berfungsinya Badan Pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting peranannya untuk keberlanjutan program sarana air bersih. Pengelola berfungsi secara efektif dan memiliki aturan-aturan organisasi dan pengelolaan yang diputuskan bersama secara musyawarah antar anggota

badan pengelola dengan masyarakat agar semua pihak terkait mengetahui dan mematuhi. Peningkatan kapasitas Badan Pengelola pada tahap pasca konstruksi dibutuhkan karena mengingat perannya terhadap keberlanjutan kegiatan karena sarana air yang tersedia adalah milik publik.

4.2.1. Pembentukan Badan Pengelola

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAM) adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masyarakat yang difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, LKM dan Pemerintah Kelurahan yang anggotanya *dipilih dari dan oleh* masyarakat, dan disahkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Lurah dengan Koordinator LKM. Badan Pengelola dibentuk menjelang kegiatan konstruksi selesai, atau pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 80%. Organisasi badan pengelola sedapat mungkin melibatkan kaum perempuan dan masyarakat miskin karena mereka merupakan pengguna utama, tanpa mengorbankan keahlian yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Jika disepakati oleh masyarakat, anggota Badan Pengelola dapat berasal dari satuan pelaksana (satlak) Pamsimas.

Fungsi dan tugas utama BP SPAM adalah untuk mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang terbangun sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat. Bersama-sama dengan masyarakat penerima manfaat, BP SPAM juga bertanggungjawab untuk mengembangkan tata kelola atau aturan untuk

pemanfaatan, pengelolaan termasuk menetapkan iuran yang menjamin keberlanjutan layanan, pengembangan pelayanan, dan kegiatan pelestarian sumber daya air dan lingkungan. Selain itu, Badan Pengelola juga berperan untuk mengorganisir kegiatan peningkatan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat

BP SPAM dibentuk dengan tujuan agar ada suatu wadah resmi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun sehingga terjaminnya keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, menjaga kualitas pelayanan bagi penerima manfaat, dan semakin luasnya pelayanan air minum dan sanitasi kepada masyarakat.

Terbentuknya dan berfungsinya organisasi pengelola dan pemelihara menjadi prioritas utama program PAMSIMAS yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam menjaga ketersediaan air bersih. Agar sarana air bersih terpelihara, maka diperlukan pemeliharaan dengan membentuk organisasi yang bisa mengelola asset secara swadaya, untuk itu harus selalu dilakukan penyadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana air bersih milik masyarakat, bukan milik pemerintah, jadi harus dipelihara bersama.

Sampai sejauh ini masyarakat di keempat kelurahan yang mendapatkan program merasakan pelayanan yang baik dari pengelola sarana. Masyarakat sebagai penerima manfaat program menyatakan pengelola sarana melakukan tugasnya dengan baik seperti mengatur bagaimana air dibagi,

menagih iuran dan kontrol setiap bulannya, serta sebagai petugas yang menerima keluhan serta menampung aspirasi masyarakat. Dengan demikian sebanyak 54,6% partisipan mengatakan mutu pelayanan pengelola sarana dalam kategori baik, terlebih sebanyak 63% partisipan bahwa dengan adanya BPS banyak manfaat yang diperoleh.

Kemampuan lembaga dalam mengelola sarana ditunjukkan dengan kegiatan membersihkan bak penampungan air, pemeliharaan rutin pipa sambungan, pemeriksaan mesin bor dan sarana operasional lainnya, serta mengurus pembagian air sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Walaupun secara umum Badan Pengelola Sarana sudah memberikan pelayanan semampunya, namun tetap saja ada masyarakat yang masih kurang puas terhadap kinerja pengelola sarana. Hal ini terlihat dengan keluhan warga yang hanya sedikit mendapatkan air pada musim kemarau terutama warga yang tinggal di daerah yang lebih tinggi, padahal saat itu sudah ada pembagian jatah air. Selain itu masih ada masyarakat yang mengaku bahwa air yang mengalir agak keruh. Hal ini terjadi di kecamatan Tembalang dan Rowosari. Kendala ini sangat sulit diatasi oleh BPS karena kejadian tersebut dipengaruhi oleh morfologi tanah dan cuaca. Permasalahan ini menyebabkan beberapa kelurahan mengganti pengelola sarannya, namun karena saat ini tengah berlangsung musim hujan setelah ada pergantian masyarakat mengaku tidak ada masalah.

Sedangkan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun maka dibutuhkan dana yang bersumber dari masyarakat

dalam bentuk iuran, dimana iuran tersebut digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan serta pembangunan sarana yang ada. Besarnya iuran tersebut pun sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan sesuai dengan musyawarah yang sebelumnya diadakan, dalam hal ini rata-rata pihak masyarakat dan BPS menentukan iuran air Rp 1.000,- per m³ nya. Pengelola sarana mengalokasikan iuran yang ada dengan membayar penggunaan listrik sarana air, kaporit, dan tawas saat pembersihan, sebagai biaya perbaikan saat ada kerusakan dengan upah tenaga orang yang ahli atau mengganti peralatan yang sudah rusak, pemeliharaan rutin yang sifatnya sulit atau bersifat mekanik, dan honor untuk pengelola itu sendiri. Keyakinan masyarakat terhadap kemampuan lembaga dalam mengelola anggaran terlihat dengan 88,9% partisipan memilih kategori mampu.

Kemampuan lembaga pengelola sarana dan keuangan juga terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan setiap bulannya pada rapat kelurahan. Hal ini memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi iuran bulanan yang selama ini mereka berikan, selain itu pada rapat bulanan tersebut BPS juga memberikan informasi mengenai kondisi sarana yang saat ini dimiliki.

4.2.2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana

Pelestarian kegiatan PAMSIMAS sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan pengelola dalam mengoperasikan dan memelihara sarana-prasarana air, dan disiplin masyarakat/pengguna dalam mematuhi peraturan

dalam memanfaatkan air. Badan Pengelola bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat penerima manfaat untuk mengembangkan dan menetapkan aturan pemanfaatan sarana. Aturan pemanfaatan sarana tergantung pada jenis sarana yang digunakan dan kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan. Misalnya, jika sarana tidak berfungsi 24 jam harus disepekat berapa jam dan pada waktu kapan sarana berfungsi dan melayani masyarakat. Dan jika sarana berupa fasilitas umum, cara seperti apa yang diperbolehkan untuk memperoleh layanan (misalnya apakah sambungan menggunakan selang air diperbolehkan atau tidak, dan lain-lain). Aturan pemanfaatan akan menjadi lebih kuat dan terlembaga jika kemudian dikuatkan dalam Peraturan Kelurahan.

Masyarakat sendiri pada tahap sosialisasi diberikan pengarahan mengenai bagaimana cara mengelola sarana yang ada di rumah masing-masing masyarakat terutama bila terjadi kerusakan sehingga mampu memperbaiki sendiri dan tidak mengeluarkan ongkos lebih. Terlebih sarana yang ada di rumah penduduk hanya berupa kran air, selang dan pipa sambungan. Namun pada pelaksanaannya sampai sejauh ini kebanyakan masyarakat merasa sarana yang dipasang tidak pernah rusak dan tergolong awet karena dibangun dengan bahan berkualitas dan oleh orang-orang yang ahli. Sementara masyarakat yang pernah mengalami kerusakan atau ingin memperpanjang saluran pipa, biasanya mengupah orang lain untuk melakukannya, pada umumnya penduduk wanita mengalami kesulitan bila terjadi kerusakan karena keterbatasan kemampuan.

Disisi lain tidak terlalu sulit mengelola sarana induk air bersih, unit teknis sarana biasanya dipantau oleh mekanika yang ahli, tugas pembersihan tandon air, pemantauan debit air dan pembagiannya, serta pembayaran listrik dilakukan oleh pengelola sarana yang ditunjuk. Namun di Kelurahan Tembalang, beberapa bulan setelah pembangunan sarana terjadi kerusakan pada mesin bor dan saringan air, kerusakan ini dikarenakan galian yang terlalu dalam sehingga airnya bercampur dengan unsur besi dan merusak mesin bor serta saringan air, akibatnya mesin bor harus diganti dengan yang baru.

Sarana yang terjamin ketahanannya dan cukup sederhana akan memudahkan BPS dan masyarakat dalam mengelola, namun tidak berarti dengan sarana yang baik seluruh masyarakat mendapatkan debit air yang deras. Hal ini terjadi di keempat Kelurahan tempat penelitian, dimana masyarakat yang rumahnya berada di daerah yang lebih tinggi, tidak mendapatkan air secepat penduduk yang rumahnya di daerah yang lebih rendah, hal ini mengingat sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu masyarakat yang rumahnya jauh dari tower PAMSIMAS mengaku air yang mengalir tidak terlalu deras.

Walaupun sumber air bersih masih tercukupi, namun masyarakat yang mengalami kejadian ini ikut kesal karena sudah tepat waktu membayar iuran dan merasa harusnya mendapatkan pelayanan yang baik. Menghadapi persolan ini BPS di Kelurahan Bulusan mencari solusi bagi warganya, yakni dengan melakukan pembagian air dengan sistem penggiliran. Setelah

kebijakan tersebut, saat ini masyarakat yang rumahnya lebih tinggi mendapatkan aliran air yang memadai, walaupun ada masyarakat yang mengeluh solusi ini masih kurang tepat karena air tidak bisa dinyalakan kapanpun sesuai keperluan. Hal serupa juga dilakukan oleh BPS di Kelurahan Tembalang walaupun hanya pada saat musim kemarau saja. Sementara di Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Rowosari belum ada tindakan serupa.

Secara umum permasalahan dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana tidak terlalu besar. Kendala-kendala yang ada terjadi karena pengaruh alam atau cuaca, selain itu kesulitan dalam pembagian air yang adil sesuai dengan kebutuhan cukup sulit dilakukan karena memang jumlah pengguna air atau konsumen PAMSIMAS cukup banyak dan melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga air yang terbagi ke masing-masing rumah pun semakin sedikit.

4.2.3. Kestinambungan/Keberlanjutan Program

Tahapan kesinambungan dilakukan setelah kegiatan regular program Pamsimas selesai dilakukan yang ditandai dengan telah terbangunnya sarana air minum dan sanitasi, dan juga berjalannya mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan (Badan Pengelola, iuran, dll). Tahapan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan penguatan pada aspek-aspek yang mempengaruhi kesinambungan.

Keberhasilan dari kesinambungan program sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan dan penggunaan sarana air minum. Adanya kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola, bertanggungjawab, dan berpartisipasi harus didukung pula dengan keterlibatan lembaga masyarakat dan campur tangan pelaksana program. Tingkat partisipasi pengguna harus memperhatikan aspek gender dan kemiskinan dalam pengelolaan sarana air minum. Semua masyarakat, perempuan dan laki-laki, kaya-miskin, dan juga kelompok umur berbeda mempunyai akses yang setara dalam menggunakan sarana tersebut. Untuk itu agar penyediaan sarana bisa dinikmati oleh semua kalangan harus sesuai dengan *demand status* (kebutuhan) masyarakat penerima program.

Kegiatan kesinambungan program merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan dampak yang dialami oleh masyarakat setelah mendapatkan program ini. Masyarakat di kelurahan Tembalang, Bulusan, Mangunharjo, dan Rowosari mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air bersih, terlebih karena daerah tersebut tidak mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM dan masyarakat hanya mengandalkan sumur gali atau air sungai yang biasanya kering pada saat musim kemarau. Namun setelah adanya program ini dengan biaya yang dapat dijangkau dan dengan sarana yang sederhana, masyarakat bisa menikmati air hanya tinggal membuka kran saja. Hal ini didukung oleh data kumulatif dimana sebanyak 98,2% partisipan setuju mengatakan mendapat kemudahan memperoleh air bersih setelah adanya program. Selain itu dengan kedalaman mencapai 100 meter, memungkinkan air tetap mengalir pada musim kemarau dan tetap deras, namun karena saat

musim kemarau sumur warga kebanyakan kering dan hanya mengandalkan sumber air PAMSIMAS, jadi air yang mengalir tidak sederas pada saat musim hujan, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tidak kebagian air. Permasalahan ini terjadi karena pengguna sarana meningkat, dimana satu sumber air PAMSIMAS rata-rata diperuntukkan 90-120 KK, namun pada kenyataannya konsumsi air mencapai 100-200KK per kelurahan. Sayangnya, kenyataan ini tidak diketahui masyarakat secara keseluruhan, terlihat dari pengumpulan data yang dilakukan bahwa secara kumulatif sebanyak 41,7% partisipan mengatakan adanya pengaruh cuaca terhadap kualitas ketahanan air, baik itu termasuk dalam kategori sangat berpengaruh, berpengaruh, dan cukup berpengaruh. Dalam hasil wawancara yang dilakukan, hal ini tidak mungkin terjadi karena mengingat sumber air yang digunakan berasal dari tempat yang sudah dideteksi terlebih dahulu besaran kapasitas air bawah tanahnya dengan menggunakan teknologi tertentu.

Berbeda pada saat musim kemarau, saat musim penghujan masyarakat justru lebih memilih menggunakan sumur gali atau sanyo dibandingkan dengan menggunakan air PAMSIMAS. Hal ini dikarenakan air sumur warga tersisi penuh dimana bisa dikatakan air yang diperoleh lebih dari cukup, sehingga masyarakat merasa sangat sayang mengeluarkan uang lebih bila menggunakan air PAMSIMAS. Pada saat seperti ini biasanya air PAMSIMAS hanya digunakan untuk mencuci motor dan siram tanaman. Tapi ada juga masyarakat yang memilih tidak menggunakan air sumur lagi dan beralih menggunakan air PAMSIMAS bahkan untuk air minum sekalipun.

Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut merasa air PAMSIMAS lebih jernih dan biaya yang dikeluarkan selama penggunaan lebih murah dibandingkan bila menggunakan *Sanyo*.

Kegiatan kesinambungan program ini salah satunya ditekankan pada kesinambungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dimana sebelumnya terdapat sosialisasi PHBS untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pengetahuan pentingnya hidup bersih. Program ini sebenarnya ditujukan terlebih pada daerah yang sarana sanitasinya tidak memadai, namun karena keempat daerah penelitian memiliki sanitasi yang layak, kegiatan PHBS dilakukan dalam bentuk penyuluhan saja tanpa pembangunan sarana sanitasi. Kesinambungan program PHBS terlihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang hidup sehat walaupun sebelumnya sudah melakukan hidup sehat dan bersih, terlebih di Kelurahan Rowosari, setelah adanya program sudah jarang masyarakat yang BAB sembarangan di kali atau sawah.

Untuk memahami keseluruhan analisis fenomena penelitian diatas, berikut dibawah ini dijelaskan matriks keadaan ideal program dan keadaan yang terjadi di masyarakat dalam Teori Umum Sistem:

Tabel 4.1. Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analisis Evaluation Model*)**Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat**

No	Sosialisasi Program di Masyarakat yang Ideal				
	<i>Input</i>	<i>Activities</i>	<i>Output</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impact</i>
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Shortlist daerah yang mendapat program - Dana Pemerintah Pusat 70% - Dana APBD 10% - Kontribusi masyarakat 20% - Instrumen Pelaksana Program 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan latar belakang dan tujuan program - Sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sarana - Pelatihan sederhana kepada masyarakat dalam diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai Program - Produk Hasil sosialisasi seperti kesepakatan, pengadaan barang & jasa, konstruksi sarana air minum - Peran dan tanggungjawab masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengetahui gambaran umum program - Memiliki Kepedulian terhadap program - Partisipasi masyarakat terjalin 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memiliki kesepahaman mengenai penyediaan air bersih yang akan mereka terima, dan secara khusus mampu berpartisipasi aktif disetiap kegiatan hingga terbentuknya sarana tersebut
	Sosialisasi Program di Masyarakat Berdasarkan Penelitian				
	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pemerintah Pusat 70% - Dana APBD 10% - Kontribusi masyarakat Rp 300.000-Rp400.000 - Instrumen Pelaksana Dinkes, PSDA, LKM, Bappeda, Ketua RT/RW 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan 3-4 kali oleh organisasi pelaksana - Diskusi kelompok mengenai gambaran program - Pelatihan berkaitan dengan penyediaan barang-jasa, dan konstruksi sarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat kebanyakan mengikuti pelatihan 1-2 kali - Ketersediaan barang dan jasa - Informasi mengenai PAMSIMAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengetahui mendapatkan bantuan air bersih, dgn kesempatan yang sama - Masyarakat yang kebanyakan jarang ikut sosialisasi tidak mengetahui program secara spesifik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu membentuk pengelola yang nantinya mampu memelihara sarana yang tersedia - Masyarakat memiliki rasa memiliki untuk secara bertanggungjawab memelihara sarana yang tersedia.

No (1)	Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum yang Ideal				
	<i>Input</i> (2)	<i>Activities</i> (3)	<i>Output</i> (4)	<i>Outcomes</i> (5)	<i>Impact</i> (6)
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Dana - Jasa Teknis - Peralatan dan Perlengkapan - Daftar Pemakai Air 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Tim Fasilitator masyarakat - Pertemuan informal membicarakan kriteria kegiatan - Pengadaan Barang dan jasa - Pembangunan konstruksi Pengawasan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan air bersih - Terbangunnya sarana konstruksi - Akses masyarakat pada sarana air bersih terbangun - Hasil konstruksi berupa sumur gali dilengkapi dengan pompa dan sambungan air kerumah masyarakat berupa kran umum dilengkapi meteran 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya sarana air bersih di masyarakat - Masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan air bersih - Pengawasan rutin mengakibatkan kualitas pekerjaan yang baik dan sarana yang awet - Bertambahnya keterampilan masyarakat yang kemungkinan besar baru pertama kali mengelola 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kesehatan masyarakat melalui air bersih yang tersedia - Mutu Pekerjaan konstruksi berpengaruh terhadap kesinambungan dari sarana yang telah dibangun. - Dampak jangka panjang dengan pembangunan air ini masyarakat terbantu dari sisi ekonomi karena harganya lebih murah.
Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Berdasarkan Penelitian					
	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Fasilitator program & LKM - Tenaga ahli Tanah yang diwakafkan - Bahan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana konstruksi dengan teknologi sederhana - Pelatihan LKM yang nantinya menjadi BPS - Pendampingan dari fasilitator - Pengawasan kemajuan pembangunan - Pemilihan lokasi pembangunan harus memiliki air bawah tanah yang baik dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia fasilitas sarana air bersih - Sarana yang sederhana - Masyarakat Memperoleh akses air minum - Kualitas air yang baik dan bersih - Hasil konstruksi: sumur gali dilengkapi dengan pompa dan sambungan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana yang sederhana mudah dioperasikan oleh masyarakat - Pengetahuan mengenai kualitas bangunan dan memiliki keterampilan yang nantinya diaplikasikan setelah menjadi BPS - Kedalaman air menyebabkan air yang mengalir mampu mencukupi kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan masyarakat dalam memperoleh air bersih - Masyarakat secara swadaya mampu mengelola sarana yang ada - Adanya konflik antara pengelola dengan masyarakat yang tinggal didaerah lebih tinggi karena merasa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>bisa menjangkau seluruh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaliran air mencapai kedalaman 100 meter - Kurang koordinasi antara tim fasilitator dengan masyarakat mengenai barang yang digunakan untuk pembangunan 	<p>kerumah masyarakat berupa kran umum dilengkapi meteran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asas keadilan dan kemudahan dalam perhitungan penggunaan air dengan meteran - Air yang dialirkan dalam kondisi baik karena dikerjakan orang berpengalaman - Kesulitan dalam koordinasi ketingkat Pemkot, pihak LSM tidak bisa memberikan keterangan mengenai bahan material bangunan yang digunakan - Akibat penggalian terlalu dalam, di salah satu kelurahan material tanah bercampur dengan air sehingga air yang mengalir berbau besi dan kurang jernih - Kelurahan lain, pipa sambungan yang berdiameter sama mengakibatkan daerah yang lebih tinggi lebih kecil aliran airnya 	<p>adanya ketidakmerataan pembagian air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengelola program

No	Pelaksanaan Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang Ideal				
	<i>Input</i>	<i>Activities</i>	<i>Output</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impact</i>
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat - Tim Fasilitator - Keahlian teknikal PHBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemicuan hidup bersih dan sehat seperti buang air besar pada jamban yang bersih, dan mencuci tangan dengan sabun - Mencegah masyarakat mengkonsumsi air tidak bersih yang menyebabkan diare - Memantau pelaksanaan pemicuan PHBS - Identifikasi kebiasaan penggunaan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan PHBS - Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS - Masyarakat sasaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian kondisi bebas dari praktek BAB Sembarang tempat - Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih - Peningkatan pengetahuan akan PHBS - Peningkatan jumlah masyarakat yang menerapkan cuci tangan pakai sabun 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan perilaku sehat baik setelah selesainya pelaksanaan program - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat - Mengurangi pencemaran lingkungan
Pelaksanaan Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berdasarkan Penelitian					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja kesehatan dan fasilitator - Masyarakat - Fasilitas penunjang/ peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemicuan PHBS dengan diskusi kelompok mengenai BAB Sembarangan dan cuci tangan sebelum makan - Identifikasi masalah dan analisis situasi - Pendidikan hidup sehat sejak dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat - Kesehatan badan/well being - Partisipasi masyarakat dalam pemicuan - Layanan PHBS - Masyarakat kebanyakan tidak menggunakan air PAMSIMAS sebagai sumber air minum - Secara keseluruhan sarana sanitasi di masyarakat sudah tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan derajat kesehatan - Perubahan perilaku menjadi lebih sehat - Masyarakat dulunya BAB di kali atau tegalan tersadar setelah promosi PHBS - Penyehatan lingkungan - Masalah diare tidak dipengaruhi penggunaan air PAMSIMAS - Kebanyakan masyarakat sudah melakukan PHBS sejak dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Hidup bersih dan sehat selalu dilakukan oleh masyarakat - Pencemaran lingkungan di kali atau tegalan akibat limbah manusia bisa diatasi sehingga lingkungan lebih sehat

No	Badan Pengelola yang Ideal				
	<i>Input</i>	<i>Activities</i>	<i>Output</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impact</i>
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat - Satuan Pelaksana/ LKM - Iuran Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Badan Pengelola - Pengembangan pelayanan - Mengorganisir peningkatan praktek PHBS - Mengelola aset secara swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan air bersih yang terpelihara - Ketahanan sarana - Ketepatan alokasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan operasional air bersih - Adanya laporan mengenai iuran dan kondisi sarana - Masyarakat mendapatkan air yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya pemeliharaan sarana yang terorganisir dan mampu membantu masyarakat bila mengalami kesulitan dalam penggunaan sarana
	Badan Pengelola Berdasarkan Penelitian				
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator Masyarakat/ Satlak - Pemerintah kelurahan - Iuran masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah membentuk BPS - Musyawarah mengenai sistem pengoperasian dan pemeliharaan sarana oleh BPS - Menetapkan iuran Rp 1000 m³ sesuai kesepakatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya BPS - Pengelolaan , pemeliharaan dan perbaikan - Kemampuan BPS dalam pengembangan sarana - Tanggungjawab BPS mengelola sarana secara swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lembaga yang menampung keluhan masyarakat - Terpeliharanya sarana - Ketidakpuasan terhadap BPS bila airnya keruh dan tidak mengalir lancar 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menyerahkan tanggungjawab keberhasilan pengelolaan sarana kepada BPS sehingga, masyarakat kurang mempunyai rasa kepemilikan akan sarana yang ada. Justru pada saat terjadi masalah, kebanyakan protes daripada memikirkan solusi bersama

No	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana yang Ideal				
	<i>Input</i>	<i>Activities</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Impact</i>
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan BPS - Sarana yang terbentuk - Mekanika ahli 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan debit air - Pembagian air - Menagih iuran dan kontrol tiap bulannya - Menerima keluhan dan aspirasi masyarakat - Mengelola sarana yang tersedia agar tetap awet - Melakukan tindakan bila terjadi kerusakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan sarana - Kesempatan yang sama dalam memperoleh air bersih - Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan - Tersedianya fasilitas dalam jangka waktu panjang - Ketersediaan air bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya kualitas air bersih - Meningkatnya kepedulian masyarakat melalui partisipasi - Terpenuhinya pelayanan air sesuai rencana - Sarana mampu melayani sasaran atau pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan program melalui keberhasilan pengelolaan
Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Berdasarkan Penelitian					
	<ul style="list-style-type: none"> - BPS Masyarakat - Mekanika ahli - 90-120 KK pengguna air 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan tandon air - Pembagian air, beberapa kelurahan menggunakan penggiliran - Menagih iuran setiap bulan - Membayar biaya penyusutan dan beban operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan Pembagian air - Tersedia air bagi masyarakat - Biaya operasional tidak melebihi iuran yang terkumpul - Laporan Keuangan tiap bulan di rapat bulanan RT atau RW - Adanya ketidakpercayaan masyarakat membuat di beberapa kelurahan terjadi pergantian BPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana yang baik belum tentu masyarakat secara merata mendapatkan air yang deras, dipengaruhi topografi - Pengguna air melebihi kapasitas, rata-rata pengguna air tiap daerah 100-200 KK - Masyarakat mengetahui kondisi keuangan karena adanya transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmerataan pembagian air mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPS - Terkumpulnya dana yang cukup untuk pengembangan program

No	Kesinambungan Program yang Ideal				
	<i>Input</i>	<i>Activities</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Impact</i>
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Kebijakan - Sarana-prasarana - Dana dalam bentuk Iuran - Fasilitas air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sarana air bersih yang tersedia - Musyawarah berkala untuk pertanggungjawaban program - Pengembangan sarana - Pencegahan penyakit yang ditularkan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kesehatan - Perubahan PHBS - Layanan sarana Sanitasi yang berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesehatan generasi muda - Masyarakat tergerak untuk bersama-sama peduli akan kesehatan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya pelayanan air yang baik dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dalam waktu yang lama - Derajat kesehatan meningkat
Kesinambungan Program Berdasarkan Penelitian					
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Kebijakan - Sarana-prasarana - Dana dalam bentuk Iuran - Fasilitas air bersih - Fasilitas sanitasi sebelum program sudah tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan kualitas air - Perubahan PHBS - Kerutinan masyarakat membayar iuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan PHBS berlangsung sampai sat ini - Produk pergantian sarana: saringan air, pipa sambungan - Layanan penyediaan air bersih oleh BPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat BAB sembarangan menurun bahkan jarang ditemukan lagi - Kehidupan keluarga lebih sehat dan bisa menghemat - Kualitas kebersihan lingkungan dalam penggunaan air bersih - Masyarakat terbantu mendapatkan air pada musim kemarau 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kemudahan dalam mendapatkan air bersih, karena air PAMSIMAS tidak dipengaruhi cuaca - PHBS sudah dilakukan oleh kebanyakan masyarakat sehingga dampak pada kondisi kesehatan tidak begitu terlihat

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Evaluasi program PAMSIMAS di Kecamatan Tembalang merupakan salah satu program Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan dana dari Bank Dunia dalam rangka menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat melalui penyediaan air bersih dan atau sarana sanitasi.

Program PAMSIMAS melibatkan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat yang mendapatkan program berperan sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program. Terlebih masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi dana sebesar 20% dari total keseluruhan dana yang diperlukan, dengan tujuan agar masyarakat merasa memiliki tanggungjawab atas sarana yang nantinya dibangun.

Program PAMSIMAS di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2008, Kecamatan Tembalang sebagai lokus penelitian merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang mendapatkan program. Sesuai dengan teknik sampel yang diambil peneliti, maka ditemukan empat Kelurahan yang menjadi fokus lokus penelitian, yakni Kelurahan Rowosari yang mendapatkan program tahun 2008, Kelurahan Tembalang, Bulusan, dan Mangunharjo dengan tahun anggaran 2009. Adapun keempat Kelurahan tersebut sebagai sampel penelitian salah satunya dengan pertimbangan untuk memperoleh dampak yang dirasakan masyarakat setelah penerapan program.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari program PAMSIMAS dan untuk mengetahui pemeliharaan serta pengelolaan sarana. Melalui pengumpulan data dan analisis terhadap fenomena penelitian maka dapat disimpulkan:

(1) Dampak Program PAMSIMAS

(1.1) Melalui pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya program PAMSIMAS, masyarakat di Kecamatan Tembalang yang menjadi sampel penelitian menggunakan sumber air sumur gali dan belum mendapatkan sambungan air bersih dari PDAM. Hal ini membuat masyarakat sulit mendapatkan air bersih pada musim kemarau karena sumur gali yang dimiliki warga kering dan keruh. Namun setelah mendapatkan bantuan program PAMSIMAS, masyarakat merasa adanya peningkatan akses terhadap sarana air bersih, dimana sebanyak 57,4% masyarakat mengaku mengatakan mudah mendapatkan air bahkan 23,2% dari partisipan mengatakan sangat mudah. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa sarana yang tersedia cukup sederhana pengoperasiannya hanya dengan stop kran saja, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan manfaat PAMSIMAS termasuk kategori murah, hanya Rp 1000 per meternya, debit air tidak berkurang pada musim kemarau, selain itu selama pemakaian air juga tidak pernah mengalami gangguan kesehatan.

- (1.2) Dampak lainnya untuk kecukupan air bersih bahwa 75% partisipan menyatakan bahwa setelah adanya PAMSIMAS kebutuhan air bersih terpenuhi. Pada musim penghujan, sumur masyarakat penuh, jadi kebanyakan air PAMSIMAS dimanfaatkan masyarakat hanya untuk cuci motor, siram tanaman, atau cuci piring saja. Namun beberapa masyarakat masih tetap menggunakannya untuk keperluan sehari-sehari bahkan untuk air minum seperti biasanya. Disisi lain, walaupun mayoritas partisipan yakni sebanyak 58,3% menyatakan ketahanan air tidak dipengaruhi oleh cuaca, namun sebanyak 25,9% partisipan berpendapat bahwa air yang tersedia sangat dipengaruhi oleh cuaca dimusim kemarau. Hal ini disebabkan karena masyarakat mendapatkan debit air sedikit dibandingkan musim hujan. Namun ternyata setelah menganalisis seluruh data, terlihat bahwa kualitas air tidak dipengaruhi cuaca. Masyarakat mendapatkan air lebih sedikit karena sumber air sumur yang biasanya dipakai sehari-hari kering, sehingga masyarakat hanya mengandalkan air PAMSIMAS saja. Hal ini menimbulkan konsumsi yang lebih besar dibandingkan penggunaan biasanya saat musim hujan, sehingga air yang terbagi ke masyarakat lebih sedikit.
- (1.3) Promosi PHBS dilakukan oleh organisasi pelaksana kepada masyarakat penerima program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mengubah pola hidup bersih dengan

membuang kotoran bayi/balita pada jamban, mencuci tangan dengan sabun setelah BAB dan sebelum makan. Adanya dukungan dari masyarakat terlihat dari jumlah partisipan 38,9% mengikuti promosi PHBS sebanyak 1-2 kali yang biasanya diikuti oleh ibu-ibu dan juga diadakan di sekolah. pelaksanaan pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk hidup bersih. Terlebih dengan bertambahnya sarana air bersih di Kelurahan Mangunharjo sudah jarang ditemukan BAB sembarangan di kali, sawah, ataupun tegalan, karena air sudah tersedia di rumah masing-masing dengan hanya tinggal membuka kran air saja. Sementara itu di Kelurahan lainnya PHBS sudah dilakukan sebelum adanya PHBS dari PAMSIMAS karena sudah baiknya kesadaran sejak dini terlebih sarana sanitasi di Kelurahan ini sudah tersedia dengan sangat baik hal ini membuat sebanyak 31,5% partisipan tidak mengikuti pelatihan PHBS. Kesenambungan PHBS masih dilakukan masyarakat sampai saat ini dimana partisipan yang menggunakan air PAMSIMAS sebahagian besar jarang menderita diare terlebih karena kebanyakan tidak menggunakan air tersebut sebagai air minum. Masyarakat melakukan kebiasaan hidup bersih sesuai dengan yang dianjurkan seperti tidak BAB sembarangan dan cuci tangan sebelum makan.

(1.4) Terbentuknya sarana air bersih membawa dampak tidak langsung pada peningkatan sanitasi khususnya terjadi pada masyarakat di

Kecamatan Rowosari dan Mangunharjo mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air bersih. Hal ini dikarenakan sarana yang terbangun dirumah masing-masing merupakan sarana sederhana dan air yang mengalir selalu lancar, dengan cara mengalirkan air melalui perpanjangan selang ke kamar mandi atau jamban keluarga. Kemudahan memperoleh air tersebut berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang saat ini sudah rajin BAB di jamban keluarga, karena air bisa langsung dialirkan ke kamar mandi warga. Sebelumnya masyarakat sering BAB di kali atau sungai karena untuk memperoleh air membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena harus menimba terlebih dahulu dan air yang tersedia juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- (1.5) Sebelum pembangunan sarana PAMSIMAS, masyarakat mendapatkan sosialisasi dari organisasi pengguna mengenai gambaran umum program, memiliki pemahaman yang baik akan sarana yang dibangun, yang selanjutnya akan menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengelola sendiri sarana yang tersedia dan menimbulkan rasa kepemilikan bersama. Masyarakat membentuk sendiri badan pengelola program yang diputuskan secara musyawarah antar anggota, termasuk selanjutnya memutuskan biaya operasional dan pengelolaan berkelanjutan di masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terbentuk melalui pemberdayaan yang dilakukan pada saat sosialisasi mampu memberikan keterampilan

dan pengetahuan, sehingga sarana yang terbangun bisa terjaga dengan baik dan didukung oleh kelembagaan yang dibentuk sendiri oleh masyarakat.

(2) Pemeliharaan serta pengelolaan sarana

(2.1) Badan pengelola merupakan wujud peran serta masyarakat dalam menjaga ketersediaan air setelah penyediaan sarana. Masyarakat diminta untuk mengelola sarananya sendiri untuk itu dibentuklah BPS yang beranggotakan masyarakat itu sendiri untuk memelihara, memantau pengembangan dan perbaikan sarana.

(2.2) Melalui penelitian ini terlihat bahwa masyarakat dikeempat kelurahan mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola karena pengelola melakukan tugasnya dengan baik seperti mengatur bagaimana air dibagi, menagih iuran Rp 1000 m³ dan kontrol tiap bulannya, serta menampung aspirasi masyarakat, membersihkan bak penampungan air, dan memeriksa mesin bor serta sarana lainnya. Kemampuan BPS juga terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan setiap bulannya pada rapat kelurahan.

(2.3) Sarana yang dibangun sudah dikelola dengan baik oleh BPS namun tidak senantiasa sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan debit air yang deras walaupun pada dasarnya kebutuhan air tercukupi. Keluhan terhadap pengelolaan terjadi

setiap musim kemarau terutama warga yang tinggal di daerah yang lebih tinggi sulit mendapatkan air dibandingkan warga yang tinggal ditempat yang lebih rendah. Beberapa kelurahan sudah mengatasi masalah ini dengan pembagian/penggiliran air. Sementara dibeberapa kelurahan lain belum bisa mengatasinya.

- (2.4) Saat awal pembangunan konstruksi di salah satu kelurahan mengalami material tanah bercampur dengan air dan sulit dibuang sehingga air yang mengalir berbau besi dan kurang jernih, hal ini disinyalir disebabkan oleh pengebiran air yang terlalu dalam sehingga bercampur lumpur. Beberapa masyarakat mengaku airnya saat ini sudah lebih jernih dibandingkan dengan air saat pertama kali di bor.

5.2. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan permasalahan atau penyempurnaan dari pengembangan program PAMSIMAS di kemudian hari, antara lain:

- (1) Pendekatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan organisasi pelaksana sudah baik dan melibatkan masyarakat, dan akan lebih baik bila pada saat sosialisasi pemerintah menggerakkan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam setiap pertemuan sosialisasi, sehingga rasa memiliki sarana akan semakin bertambah

- (2) BPS sebagai pengelola sarana di masyarakat sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun hal ini berdampak masyarakat seolah menyerahkan tanggungjawab pemeliharaan sarana kepada BPS dan masyarakat hanya sebagai pengguna air saja. Ada baiknya disetiap kelurahan ada penggiliran BPS, sehingga kepedulian untuk menjaga melestarikan sarana, dan penggunaan yang baik bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- (3) Untuk program PAMSIMAS selanjutnya, ada baiknya organisasi pelaksana, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki koordinasi yang baik dan terbuka, serta menjalankan tugas-fungsi yang sudah ditetapkan sehingga setelah penyerahan pengelolaan kepada BPS tidak meninggalkan masalah.
- (4) Untuk program PAMSIMAS selanjutnya, diharapkan organisasi pelaksana program terlebih dahulu mempelajari seluk-beluk topografi daerah yang diberikan bantuan. Hal ini bertujuan agar air yang tersedia mengalir dengan jernih, lancar, dan merata ke seluruh masyarakat.
- (5) Perlu dilakukannya promosi PHBS setelah beberapa waktu penyediaan program. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup sehat masyarakat. Walaupun masyarakat mengaku sudah melakukan PHBS, akan lebih baik bila Pemerintah melakukan penyuluhan lagi sembari mengingatkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
- (6) BPS sebagai pengelola program diharapkan mampu melakukan pembagian air yang merata terutama menyangkut keluhan masyarakat

yang tinggal di daerah lebih tinggi, lebih sedikit mendapatkan air. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengubah diameter saluran air menjadi lebih besar dibandingkan daerah yang lebih rendah. Namun hal ini sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi, pembagian/penggiliran air merupakan salah satu jalan keluar yang tepat. Namun perlu adanya sosialisasi yang tepat kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik kebutuhan.

- (7) Pengguna air (konsumen) yang terlalu banyak mengakibatkan saat musim kemarau masyarakat mendapatkan sedikit air. Hal ini sebaiknya ditindaklanjuti oleh masyarakat dengan mengajukan anggaran pengembangan kepada pemerintah untuk membangun sarana air yang baru. Selain itu untuk selanjutnya, diharapkan BPS memiliki ketegasan untuk tidak menambah sambungan air kepada masyarakat yang baru ingin menggunakan.
- (8) PAMSIMAS merupakan salah satu program yang baik dan tepat sasaran, dimana dengan harga yang murah masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaannya, sehingga masyarakat memiliki kepedulian terhadap sarana umum dan membuat masyarakat belajar mengelola pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan, pemerintah bisa mengembangkan program serupa di beberapa daerah di Indonesia khususnya mereka yang sangat sulit memperoleh air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. (2011). *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka jaya
- Buku saku Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program Pamsimas)*. (2011). Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
- Hadi, Samsul dan Mutrofin. (2006). *Pengantar Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Pressindo
- Hartono, Djoko. (2011). Peranan Monitoring dan Evaluasi, serta Evaluasi Dampak Dalam Mendukung Intervensi Sosial. *Literatur*. Dipresentasikan pada Workshop Evaluasi Dampak untuk Mendukung Intervensi Sosial Berbasis Fakta (15 Agustus): 1-17.
- Indiahono Dwiyanto, (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Isdijoso, Widjajanti dan Vita Febriani. Evaluasi dampak : Tinjauan Metodologi, Rancangan dan Pelaksanaan. *Literatur*. Dipresentasikan pad Workshop and Public Lecture on Impact Evaluation for Evidence Based Social Intervention (15 Agustus 2011): 1-14.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Patton, Michael. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* (2010). Semarang: FISIP UNDIP
- Sabarguna, Boy. (2005). *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik* (4th ed). Jawa Barat: Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (Eds). (2007). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Kencana
- Tashakkori, Abbas dan Charles. (2010). *Mixed Methodology.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, Husaini and Purnomo Setiady. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (2nd ed). Jakarta: Bumi Aksara
- Wirawan. (2011). *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi.* Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Persiapan Program PAMSIMAS. (2011). *Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Tim Persiapan Program PAMISIMAS. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Pamsimas.* Jakarta: Departemen Dalam Negeri

Melani, Ai. (2011). Penyajian Data dan Distribusi Frekuensi. *Universitas Terbuka Korea Selatan*. Dalam <http://www.slideshare.net/>. Diunduh pada 31 januari 2012 pukul 12.16 WIB

Profil PAMSIMAS Rowosari. (2008). Dalam <http://sim.pamsimas.org/>. Diunduh pada tanggal 29 November 2011 pukul 14.15 WIB

Profile PAMSIMAS 2009. (2009). Dalam <http://sim.pamsimas.org/>. Diunduh pada tanggal 29 November 2011 pukul 14.55 WIB

Pertamina Bantu Air Bersih Kelurahan Rowosari. (2011). Dalam <http://suaramerdeka.com/>. Diunduh pada tanggal 16 Desember 14.07 WIB